

ENEWSLETTER

# PKSPARLEMEN

KREATIF DAN INOVATIF

Edisi April | Tahun 2023 No. 48

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



## Bulog Lebih Sibuk Urusi Impor

*Daripada Penyerapan Panen Raya*

*Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.*



## Anggota FPKS: Bulog Lebih Sibuk Urusi Impor daripada Penyerapan Panen Raya

Jakarta (30/03) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin menyayangkan kebijakan pemerintah dalam hal ini Badan Urusan Logistik (Bulog) yang sibuk mengurus impor beras ketimbang menyergap hasil panen petani.

Menurutnya, rencana impor beras sebanyak 2 juta ton adalah langkah mundur dan menyakiti hati petani.

"Sekarang kok Bulog lebih sibuk impor daripada pengadaan. Menurut saya kebijakan itu buruk sebab kasihan petani karena pasti akan mempengaruhi harga di tingkat bawah," ujar Andi Akmal.

Sejauh ini, kata Andi, cadangan beras yang dimiliki Bulog juga belum maksimal. Artinya penyerapan yang dilakukan terkesan lamban. Padahal saat ini Indonesia tengah mendekati puncak panen raya. Disisi lain, dia juga menyayangkan mengapa Bulog hanya menyerap beras petani pada posisi rendah.

"Itu kita sesalkan karena Bulog sudah dikasih harga yang fleksibilitas. Malahan ada perusahaan swasta yang cukup besar yang siap menampung hasil panen raya. Tetapi sekali lagi mengapa cadangan beras Bulog belum maksimal?" katanya.

Karena itu, Politisi PKS ini menegaskan fraksinya di DPR menolak tegas rencana impor

beras 2 juta ton yang dinilai telah mencederai nilai dan semangat petani dalam berproduksi.

"Kita (PKS) sudah jelas ya menolak keras impor. Apalagi angkanya tidak masuk akal. Terlebih bulan Maret dan April ini memasuki puncak panen. Ini ada apa? Jangan selalu mempertimbangkan konsumen tapi petani merugi," tegasnya.

"Pengumuman impor beras dalam waktu dekat ini pasti berpengaruh, baik itu

secara psikologis maupun langsung terhadap harga di tingkat petani. Semua serba dirugikan. Petani tertekan, konsumen masih juga membayar lebih tingginya harga beras. Panen raya tak berpengaruh apapun di masyarakat terhadap ketersediaan maupun harga beras yang wajar," Puggkas Andi Akmal Pasluddin.

Sebagaimana diketahui bersama, rencana impor beras menguat setelah Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Arief Prasetyo Adi menugaskan Perum Bulog untuk segera melakukan impor dalam memenuhi cadangan beras pemerintah. Sampai saat ini, penolakan impor terus berdatangan dari sejumlah kalangan.

"Pengumuman impor beras dalam waktu dekat ini pasti berpengaruh, baik itu secara psikologis maupun langsung terhadap harga di tingkat petani. Semua serba dirugikan. Petani tertekan, konsumen masih juga membayar lebih tingginya harga beras. Panen raya tak berpengaruh apapun di masyarakat terhadap ketersediaan maupun harga beras yang wajar,"

**Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

# Empat Alasan Rasional Fraksi PKS Tolak Tegas Impor Beras

Jakarta (22/03) — Anggota Komisi IV DPR RI asal Fraksi PKS, Slamet menyatakan menolak tegas importasi beras.

Menurut Slamet, gejala harga beras masih terus berlanjut dimana harga beras medium per tanggal 20 Maret kemarin menyentuh angka 11.900/kilogram atau telah melewati harga beras tertinggi tahun 2022 yaitu 11.340/kilogram.

Ditengah situasi seperti ini, lanjut Slamet, pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi sangkar perberasan nasional sangat reaktif, instan dan tidak terukur mulai dari kebijakan impor 500.000 ton beras pada bulan November hingga Februari 2023 padahal stok beras nasional saat ini mencapai 1,7 juta ton.

Kemudian pada bulan Februari 2023 saat petani sedang menanti panen raya pemerintah malah menetapkan harga batas bawah GKP (gabah kering panen) tingkat petani hanya Rp 4.200 per kilogram

dan harga batas 4.550 per kilogram yang tidak memperhatikan kenaikan harga BBM hingga harga pupuk non subsidi yang naik 2-3 kali lipat.

Selain itu, penetapannya juga tidak melibatkan unsur petani dalam pengambilan keputusannya.

"Belum sampai sebulan penetapannya, keputusan Badan Pangan Nasional terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) tersebut kemudian dicabut setelah menuai reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat," terangnya.

Di satu sisi, Slamet mengapresiasi karena pemerintah masih mau mendengar jeritan para petani, namun sejatinya hal ini menunjukkan tidak matangnya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan arah

sebuah kebijakan.

"Belum selesai terkait persoalan diatas beberapa hari yang lalu kita semua dikejutkan lagi dengan statemen Kemendag yang mengatakan pemerintah melalui rapat koordinasi telah memutuskan dapat sewaktu-waktu mengimpor beras 500 ribu ton lagi untuk CBP dan stabilisasi harga beras yang kian meroket," imbuhnya.

Padahal, kata Slamet, bulan-bulan ini adalah musim panen raya.

"Sampai kapan petani kita mau dikorbankan dengan kebijakan yang sangat merugikan seperti ini atau jangan-jangan memang kondisi ini disengaja karena ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan sesaat dari situasi ini?" tegasnya.

Berdasarkan pengamatannya, terdapat persoalan serius dalam tata kelola beras yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah.

"Pertama, Ketidakmampuan Pemerintah Mengendalikan Harga. Pemerintah sangat kesulitan mengendalikan harga karena tidak menguasai stok. pihak swasta besar dengan segala kemampuannya membeli gabah petani dengan harga HPP lalu memberikan bonus kepada supplier tujuannya agar stok gabah tetap masuk ke mereka," terang Slamet.

Akibatnya, kata Slamet,

market share pemerintah menjadi sangat kecil yang pada akhirnya melemahkan posisi tawar pemerintah dalam pengaturan harga.

"Kedua, Kegagalan Pemerintah Menyerap Gabah Petani. Pemerintah wajib melakukan penyerapan gabah petani semaksimal mungkin di musim panen raya ini agar stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap aman hingga akhir tahun," tegas Slamet.

Ketiga, imbu Slamet, Stok

Melimpah. Fraksi PKS menolak dengan tegas importasi beras dengan alasan pemenuhan CBP dan stabilisasi harga beras karena stok dalam negeri masih sangat cukup untuk pemenuhan tersebut.

"Keempat, Mafia Beras. Kami meminta pemerintah untuk mengusut, menangkap pelaku mafia beras yang menjadi dalang dibalik carut-marutnya tata kelola beras nasional," tutup Slamet.



"Sampai kapan petani kita mau dikorbankan dengan kebijakan yang sangat merugikan seperti ini atau jangan-jangan memang kondisi ini disengaja karena ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan sesaat dari situasi ini?"

**dr. H. SLAMET**  
Anggota Komisi IV DPR RI



## Pemerintah Kembali Berencana Impor Beras, Politisi PKS: Hentikan Niat dan Rencana Impor!

Jakarta (20/03) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiyah Uluputty meminta Pemerintah meninjau ulang rencana impor beras sebanyak 500 ribu ton sebagaimana yang disampaikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Berhenti grasa grusu untuk membuka kran impor beras. Jangan mengambil Langkah sepihak tanpa menimbang banyak aspek”, kata Saadiyah Uluputty di Jakarta Ahad, (19/03/2023)

Anggota Fraksi PKS Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Maluku ini dengan tegas menolak keinginan suara pemerintah untuk impor beras saat memasuki panen raya.

“Impor beras mesti ditolak tegas. Panen raya akan memasuki bulan Maret April hingga Mei 2023. Rencana impor saat panen raya mencekik leher petani. Cukup ironi”, lanjut Saadiyah.

Data Kementerian Pertanian dan BPS, stok beras nasional sedang surplus 1,7 juta ton. Tahun ini ada survei cadangan beras yang juga dilakukan BPS, stok beras di akhir Juni 9,71 juta ton.

Saadiyah memaparkan, mengacu data Kerangka Sampling Area (KSA) BPS mencatat produksi beras Januari-April 2023 sebesar

13,79 juta ton, naik 0,56 persen dibanding periode yang sama 2022. Produksi beras pada Mei sampai Desember 2023 pun diperkirakan cukup tinggi dengan mengacu tren produksi beras di tahun-tahun sebelumnya, misalnya 2022.

Pada Mei 2022, produksi beras sebesar 2,38 juta ton, Juni 2,51 juta ton, Juli 2,71 juta ton, Agustus 2,35 juta ton, September 2,50 juta ton, Oktober 2,38 juta ton, November 1,88 juta ton dan Desember 1,11 juta ton.

“Panen Raya tahun 2023 hingga April menghasilkan produksi gabah atau beras yang

tinggi sehingga Indonesia akan mengalami surplus. Maka tidak ada alasan import dilakukan”, sebutnya lagi.

Saadiyah menyebut jika ada upaya untuk melakukan analisis data untuk menggiring opini bahwa terjadi defisit beras.

“Tujuan penggiringan data defisit ini maksudnya jelas, biar niat pemerintah untuk impor semakin kencang”, sesalnya.

Saadiyah meminta pemerintah berdiri bersama petani beras. Tidak membuat perkiraan dan asumsi – asumsi kondisi akhir 2023 yang mendorong impor. Itu melukai para petani.

“Berdirilah bersama petani. Petani kita sedang bekerja berdarah – darah untuk mendukung produksi beras di negara ini. Membuat opini import hanya akan melukai petani kita. Hentikan wacana import tersebut,” tegasnya.

“Berdirilah bersama petani. Petani kita sedang bekerja berdarah – darah untuk mendukung produksi beras di negara ini.

Membuat opini import hanya akan melukai petani kita. Hentikan wacana import tersebut,”

## Aleg PKS: Impor Beras (Nyatanya) Bukan Solusi Pengendalian Harga

Jakarta (20/03) — Pemerintah kembali merencanakan akan mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton pada bulan Maret 2023 ini.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Amin menilai pemerintah malas berpikir dan merancang solusi yang berdimensi jangka panjang untuk mengendalikan stabilitas harga dan pasokan beras.

"Jangankan berswasembada beras, mengendalikan harga dan pasokan saja gagal," kritiknya.

Penilaian Amin didasarkan pada fakta tidak efektifnya impor beras 500 ribu ton awal tahun 2023 ini yang digunakan untuk intervensi pasar. Fakta lainnya, meski sejak Februari lalu, sudah memasuki panen raya di sentra-sentra produksi beras, harga beras tak kunjung turun.

Padahal seperti disampaikan Dirut Bulog dalam berbagai kesempatan, beras impor sebanyak 500 ribu ton

sudah masuk semua pada 16 Februari 2023 lalu atau sebelum panen raya. Pernyataan itu pun dibenarkan oleh Mendag Zulhas.

"Lha ini harga beras kok malah terus naik. Dan lucunya Presiden malah heran dengan fenomena ini. Artinya nggak faham masalah dan solusinya," sindirnya.

Ia menambahkan, jika inti masalah saja tidak tahu, maka kebijakan impor tidak akan berjalan efektif untuk mengendalikan harga beras. Kebijakan ini kemungkinan hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, yang berburu cuan atau rente dari impor pangan.

Tanpa menyelesaikan inti masalahnya, pada akhirnya konsumen tetap harus merogok dompet lebih dalam karena

harga beras tetap mahal. Sementara petani yang saat ini masih panen raya, terpaksa harus menderita kerugian karena harga jual gabah akan tertekan hingga di bawah biaya produksinya.

Sejak tahun lalu, kata Amin, para ahli sudah mewanti-wanti harga beras akan melonjak karena kenaikan biaya produksi. Biaya produksi naik karena kenaikan biaya input produksi terutama pupuk, tenaga kerja, dan transportasi akibat pengurangan subsidi BBM.

"Ditambah lagi tata niaga pangan yang masih dikendalikan oleh kelompok tertentu. Pemerintah tidak berhasil menata ulang tata niaga pangan termasuk beras, padahal pemerintah punya semua instrumen untuk mewujudkan keberpikahan pada rakyat," kata Amin.

Pantauan harga hari ini, harga beras medium menyentuh Rp12 ribu per kg, dan harga beras premium mendekati Rp14 ribu per kg. Padahal menurut Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras di penggilingan itu Rp6.200 - Rp6.300 per kg.

Artinya lonjakan harga beras bukan disebabkan kenaikan harga gabah di tingkat petani. Namun in-efisiensi di dalam sistem rantai pasok atau tata niaga perdagangan beras.

Wakil Rakyat Dari Dapil Jatin IV itu mengatakan, jika

semua kementerian menjalankan tupoksinya masing-masing terkait pangan, dia menyakini stabilitas harga dan stok beras dan kebutuhan pokok lainnya bisa cepat diatasi.

Dalam Raker dengan Komisi VI kemarin, Menteri Perdagangan mengatakan, Kemenko Perekonomian mengambil alih keputusan soal impor ini. Meskipun Mendag tidak setuju, impor harus dijalankan. Lalu apa gunanya

Badan Pangan Nasional, dan juga bagaimana kewenangan kementerian teknis.

Dari pernyataan Mendag Zulkifli Hasan tersebut, menyiratkan kewenangan impor diambil alih oleh Kemenko Perekonomian. Di sisi lain, Kementerian Pertanian selalu mengatakan stok beras surplus, apalagi saat ini masih panen raya.

Selengkapnya kunjungi [fraksidr.pks.id](http://fraksidr.pks.id)



Sejak tahun lalu para ahli sudah mewanti-wanti harga beras akan melonjak karena kenaikan biaya produksi. Biaya produksi naik karena kenaikan biaya input produksi terutama pupuk, tenaga kerja, dan transportasi akibat pengurangan subsidi BBM.

**AMIN AK, M.M.**  
Anggota Komisi VI DPR RI



# PKS TOLAK IMPOR BERAS DISAAT PETANI PANEN

Target impor Pemerintah

**2 Juta Ton**  
sampai akhir Desember 2023

- Impor 2 juta ton dalam periode 1 tahun bisa mengulang kesalahan di tahun 2018 (2,2 juta ton beras (rekor impor tertinggi))
- Akibat Bulog overstock ratusan ribu, beras bulog rusak dan dimusnahkan
- Petani merugi karena beras impor masuk, harga gabah turun



Kita menilai bahwa pemerintah ngotot melakukan impor beras telah berdampak sangat buruk bagi petani dan faktanya berdampak meningkatnya kemiskinan di pedesaan, peralihan penguasaan lahan dari masyarakat desa ke pemodal dan hancurnya kedaulatan pangan nasional

**H. Johan Rosihan, S.T**  
Anggota Komisi IV DPR RI FPKS



Harga beras dipasaran sentuh  
**Rp 13.900,-/kg**

Batas HET dari Pemerintah	
Zona 1	<b>Rp 10.900,- /kg</b>
Zona 2	<b>Rp 11.500,- /kg</b>
Zona 3	<b>Rp 11.800,- /kg</b>





Gambar: Antara

Soal Larangan Bukber bagi ASN

**HNW: Negara Harus Adil, Edaran agar Dikoreksi atau Dicabut!**

Jakarta (24/03) — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR-RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengkritisi arahan Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Kabinet agar penyelenggara negara, ASN dan Pimpinan Lembaga Negara meniadakan kegiatan buka bersama selama Ramadhan 1444 H.

HNW sapaan akrabnya mengalami banyaknya penolakan publik, dan juga mempertanyakan alasan pelarangan kerumunan dikaitkan covid-19 yang hanya diperuntukkan untuk kegiatan bukber di bulan Ramadhan, tapi tidak untuk kegiatan lainnya.

"Jika benar bahwa alasan Presiden Jokowi melarang bukber bagi ASN dan Pimpinan Lembaga Negara adalah karena terkait covid-19, maka mestinya semua kerumunan apalagi yang skalanya lebih besar dari bukber seperti kegiatan konser musik, nonton sepakbola, nonton balapan perahu di Danau Toba dan balapan Motor di Mandalika, atau kegiatan pejabat negara yang menyelenggarakan pesta pernikahan, mestinya juga dilarang. Tetapi ternyata hanya untuk bukber saja yang dilarang. Itupun hanya bagi ASN/Pimpinan Lembaga Negara. Padahal lebih banyak lagi bukber yang

diselenggarakan oleh non ASN maupun yang bukan pimpinan lembaga Negara, yang mestinya juga perlu mendapatkan larangan pemerintah agar menyelamatkan mereka semuanya dari potensi terkena Covid," disampaikan Hidayat dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/03).

"Jangan hanya kegiatan bukber ASN/Pimpinan Lembaga Negara saja yang diproteksi dengan dilarang kegiatannya karena alasan Covid, mestinya semua warga di semua kegiatan diberlakukan yang sama, adil dan bijaksana. Maka karena larangan itu tidak adil dan diskriminatif, sebaiknya ketidaksiapan diskriminatif dan tidak adil tersebut dicabut saja. Kalaupun diperlukan adanya edaran, Pemerintah bisa membuat edaran himbauan soal penerapan protokol kesehatan bagi yang melaksanakan bukber dan kegiatan lainnya yang mengundang kerumunan," sambungnya.

« SEBELUMNYA

"Jika benar bahwa alasan Presiden Jokowi melarang bukber bagi ASN dan Pimpinan Lembaga Negara adalah karena terkait covid-19, maka mestinya semua kerumunan apalagi yang skalanya lebih besar dari bukber seperti kegiatan konser musik, nonton sepakbola, nonton balapan perahu di Danau Toba dan balapan Motor di Mandalika, atau kegiatan pejabat negara yang menyelenggarakan pesta pernikahan, mestinya juga dilarang. Tetapi ternyata hanya untuk bukber saja yang dilarang.

## Soal Larangan Bukber bagi ASN, HNW: Negara Harus Adil, Edaran agar Dikoreksi atau Dicabut!

### ◀◀ SEBELUMNYA

Apalagi, lanjut Anggota DPR-RI Fraksi PKS ini, baru pada 23 Februari lalu di kegiatan Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Presiden Jokowi justru meminta agar masyarakat memperbanyak belanja, nonton konser, dan nonton bola. Hal yang pasti juga berdampak terjadinya kerumunan yang potensial bisa terkait dengan penyebaran Covid.

Pemerintah Provinsi dan Polisi bahkan diminta untuk mempermudah izin penyelenggaraan kegiatan-kegiatan tersebut dengan alasan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Padahal bukber selama Ramadhan selain sebagai sarana silaturahmi, mendengarkan ceramah Agama untuk ingatkan para ASN/pimpinan Lembaga Negara, dan merupakan tradisi/kegiatan sosial positif yang sudah mengakar di

masyarakat, juga dapat meningkatkan aktivitas dan pertumbuhan ekonomi khususnya bagi para pelaku UMKM," ujarnya.

Hidayat menerangkan, kondisi Covid-19 hari ini di Indonesia sudah landai. Berdasarkan data Satgas Covid-19, kasus konfirmasi covid-19 di angka 0,89 per 100 ribu penduduk, dan kasus kematian di angka 0,01 per 100 ribu penduduk.

Menurutnya, hal ini karena cakupan vaksinasi yang sudah masif, apalagi di kalangan ASN, terlebih lagi di kalangan Pimpinan Lembaga Negara yang bahkan mungkin sudah vaksin booster sampai 3 atau 4 kali.

"Dengan kondisi tersebut maka wajar bila berbagai aktivitas diperbolehkan, termasuk seharusnya bukber selama Ramadhan untuk kalangan ASN/Pimpinan Lembaga Negara, sebagaimana bukber yang lainnya, tetap bisa dijalankan. Sekalipun Pemerintah tetap bisa mengeluarkan edaran

himbauan terkait kepatuhan protokol kesehatan. Bukan justru mengedarkan larangan bukber yang tidak adil, diskriminatif dan tidak solutif," sambungnya.

Dirinya mengusulkan, seharusnya edaran Presiden kepada Pejabat dan ASN bukan terkait larangan bukber, melainkan spesifik terkait larangan berfoya-foya, berlebihan dan pamer kekayaan, karena hal itu yang jadi sorotan dan belakangan meresahkan masyarakat. Dan karena dalam kasus pejabat Dirjen Pajak berinisial RAT yang memantik kasus yang menjadi sorotan masyarakat justru bukan dari kalangan pejabat negara/ASN yang beragama Islam.



Seharusnya edaran Presiden kepada Pejabat dan ASN bukan terkait larangan bukber, melainkan spesifik terkait larangan berfoya-foya, berlebihan dan pamer kekayaan, karena hal itu yang jadi sorotan dan belakangan meresahkan masyarakat. Dan karena dalam kasus pejabat Dirjen Pajak berinisial RAT yang memantik kasus yang menjadi sorotan masyarakat justru bukan dari kalangan pejabat negara/ASN yang beragama Islam.

**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI



# Aleg PKS Apresiasi Budaya Kerja yang Jadi Nilai Positif pada Paparan Uji Kelayakan Calon Gubernur BI

Jakarta (21/03) — Komisi XI DPR RI menyelenggarakan fit and proper test calon Gubernur Bank Indonesia. Perry Warjiyo menjadi satu-satunya kandidat yang diuji DPR RI Senin, (20/3/2023).

Jakarta (21/03) — Komisi XI DPR RI menyelenggarakan fit and proper test calon Gubernur Bank Indonesia. Perry Warjiyo menjadi satu-satunya kandidat yang diuji DPR RI pada Senin, (20/03/2023).

Dalam uji kelayakan ini, Anis Byarwati, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS memberikan tanggapan terhadap pemaparan yang disampaikan Perry.

Budaya kerja Bank Indonesia menjadi perhatian Anis. Dalam paparannya, Perry menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan transformasi sumber daya manusia (SDM)

secara terencana, terprogram, dan transparan untuk memperkuat kepemimpinan yang berintegritas, kompeten, profesional, agile terhadap perubahan, dan berperilaku mulia di Bank Indonesia.

"Keberhasilan transformasi SDM telah banyak dicapai sejak 2018 dengan perencanaan SDM berbasis meritokrasi yang matang, manajemen karir yang jelas dan transparan, seleksi ketat pegawai kelompok potensial (talent pool) sesuai person to job fit, program kepemimpinan berjenjang dari non-officer hingga officer dan pimpinan tertinggi, program

pendidikan dan latihan untuk pengembangan kompetensi," papar Anis.

Transformasi SDM ke depan, imbuhnya, lebih difokuskan pada penguatan karakter kepemimpinan visioner dengan kemampuan 'strategic foresight leadership' agar agile terhadap perubahan, serta perilaku budi pekerti sesuai nilai-nilai kebangsaan dan spiritual menurut agama masing-masing.

"Penguatan kompetensi lebih ditekankan pada kemampuan adaptasi terhadap digitalisasi, serta penguatan eksposur kepemimpinan melalui koordinasi dan penugasan di lembaga lain baik di dalam maupun luar negeri," pungkasnya.

"Penguatan Employee Value Proposition (EVP) dengan program budaya kerja 'Aku Bangsa BI Bermakna untuk membangun kebanggaan sebagai pemimpin dan pegawai Bank Indonesia dalam mengawal perekonomian nasional dengan kebijakan, kelembagaan, dan kepemimpinan yang kuat," terang Anggota DPR RI Dapil Jakarta Timur ini.

Wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini mengatakan, poin budaya kerja yang dipaparkan Perry di atas menjadi ruh dari semua kerja Bank Indonesia.

"Betapa pun bagusnya

perencanaan strategi, kalau tidak didukung oleh budaya kerja yang merata dari pimpinan sampai lapisan bawah, maka perencanaan itu tidak akan terlaksana," ungkap Diah.

"Dan jika kita evaluasi, budaya kerja ini kerap menjadi masalah di berbagai organisasi," kata Anis.

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga mengapresiasi elaborasi yang dilakukan Perry sebagai

pimpinan ketika merumuskan budaya kerja ini.

"Ini menggambarkan budaya kerja yang dibangun bagaikan sebuah rumah yang memiliki pondasi 3 tingkat, kemudian bangunannya memiliki 3 pilar dan ada atap yang merupakan output yaitu SDM berkinerja tinggi dan berakhlak mulia," pungkasnya.

Selengkapnya kunjungi [fraksidr.pks.id](http://fraksidr.pks.id)



"Betapa pun bagusnya perencanaan strategi, kalau tidak didukung oleh budaya kerja yang merata dari pimpinan sampai lapisan bawah, maka perencanaan itu tidak akan terlaksana,"

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI



## Bedah Buku dan Sosialisasi Empat Pilar, Jazuli: Tingkatkan Kualitas SDM Indonesia!

Jakarta (31/03) -- Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini memberikan sambutan dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan Bedah Buku 'MSDM Dalam Perspektif Islam' yang bertempat di gedung Nusantara Ruang Abdul Muis DPR RI, Senayan, Jakarta (31/03).

"Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki SDM yang luar biasa dapat menjadi kekuatan yang tak tertandingi oleh negara-negara lain," ungkap Jazuli.

Pembentukan karakter manusia, imbuhnya, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan melakukan pendekatan religi

Pendekatan religi bagi pembentukan karakter manusia merupakan suatu metode yang paling efektif dalam mengubah karakter manusia dari yang kurang baik menjadi lebih baik.

"Allah SWT pernah diprotes oleh para malaikat disebabkan karena Allah SWT menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi padahal manusia hanya bisa melakukan kerusakan. Namun, Allah menjawab bahwa karakter manusia dapat dibentuk menjadi pribadi yang lebih baik" ujarnya.

Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan

bahwa sebagai seorang manusia, kita dituntut untuk selalu terus belajar, belajar, dan belajar.

Salah satu cara belajar, bukan hanya datang masuk ke

sekolah tetapi juga dapat dilakukan seperti apa yang kita laksanakan pada saat ini, yaitu diskusi ilmiah.

"Sehingga sebagai sebuah organisasi, IKADIN harus dapat terus mengobarkan semangat intelektual bagi generasi-generasi yang akan datang. Dengan begitu, diharapkan Indonesia akan menjadi negara yang lebih sejahtera dikemudian hari," tutup Anggota DPR RI dari Dapil II Banten ini.

Salah satu cara belajar, bukan hanya datang masuk ke sekolah tetapi juga dapat dilakukan seperti apa yang kita laksanakan pada saat ini, yaitu diskusi ilmiah. Sehingga sebagai sebuah organisasi, IKADIN harus dapat terus mengobarkan semangat intelektual bagi generasi-generasi yang akan datang. Dengan begitu, diharapkan Indonesia akan menjadi negara yang lebih sejahtera dikemudian hari,"

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**

Ketua Fraksi PKS DPR RI



## Bedah Buku dan Sosialisasi Empat Pilar, **HNW: Semoga Jadi Sumbangsih bagi Indonesia!**

Jakarta (31/03) --- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Daerah Pemilihan Jakarta II, Hidayat Nur Wahid menjadi keynote speaker dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan Bedah Buku 'MSDM Dalam Perspektif Islam'.

Kegiatan diadakan di Ruang Abdul Muis DPR RI, Gd. Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada Jum'at (31/03).

HNW mengapresiasi buku tersebut sebagai salah satu sumbangsih kepada Bangsa sebagaimana yang dilakukan oleh intelektual dari masa lalu.

"Kehadiran buku ini akan menjadi sumbangsih untuk mengawal dan menguatkan demi suksesnya Indonesia seperti yang dilakukan oleh Founding Fathers kita," ujar HNW.

Sebagai bagian dari

kegiatan pada hari ini, HNW menyatakan terdapat kegiatan Sosialisasi Empat Pilar, dimana kegiatan ini diadakan untuk menyegarkan kembali ingatan terkait wawasan kebangsaan.

"Sosialisasi ini saling menyegarkan kehidupan kebangsaan kita. Kaitannya dengan manajemen dan konstitusi. Indonesia ini penuh dengan Bhinneka, juga ada tunggal Ika. Beragam aspirasi dari masa lalu disampaikan, bukan dijadikan untuk membelah bangsa," papar HNW.

HNW menegaskan keteladanan di masa lalu harus

kita ingat kembali agar tidak ada perpecahan karena perbedaan pendapat.

"Perbedaan pendapat jangan menjadi alat pembelahan. Bapak dan Ibu Bangsa di masa lalu telah memberikan teladan. Pidato-pidato masa lalu membahas dua ideologi besar, keagamaan dan nasionalisme yang bersama menciptakan kompromi menjadi tunggal ika," tegas HNW.

HNW memaparkan hikmah dari tokoh masa lalu yang dengan kemampuan intelektualnya mampu merumuskan empat pilar yang terus disosialisasikan hingga saat ini.

"Hikmah besar dari tokoh masa lalu yang sangat terpelajar, yang mampu menciptakan solusi dari permasalahan. Kontribusi intelektual mereka jumlah yang menciptakan empat pilar yang di dalamnya ada pancasila. Ada beragam nilai yang mencampurkan nilai-nilai langit dan dunia, nilai-nilai sosialisme dan materialisme, musyawarah dan kualifikasi para wakil," papar HNW.

Menurut HNW, komitmen menjaga konstitusi selalu dilakukan MPR terutama untuk menyangkal isu-isu perubahan di tahun politik ini.

"Kami di MPR berusaha selalu menjaga komitmen konstitusi. Kami juga menegaskan tiadanya amandemen di periode ini. Untuk menanggapi isu terkait

perubahan kebijakan dalam jabatan presiden. Agar kita fokus menjalankan konstitusi," tegas HNW.

Akan tetapi, HNW menegaskan perubahan tetap bisa dilakukan selama intelektual terus membuat kajian, dan memberikan saran

perubahan dari kajian tersebut. "Amandemen tetap dimungkinkan di masa depan, jika intelektual kita telah mengkaji tentang hal baru. Syaratnya tidak mudah, tetapi perubahan tetap terbuka lebar," pungkas HNW



"Perbedaan pendapat jangan menjadi alat pembelahan. Bapak dan Ibu Bangsa di masa lalu telah memberikan teladan. Pidato-pidato masa lalu membahas dua ideologi besar, keagamaan dan nasionalisme yang bersama menciptakan kompromi menjadi tunggal ika,"

**Dr. H.M. HIDAYAT  
NUR WAHID, M.A**

Wakil Ketua MPR RI



## Larangan Pejabat Buka Puasa Bersama Bertentangan Dengan Revolusi Mental

Jakarta (24/03) --- Anggota Komisi Hukum DPR RI Muhammad Nasir Djamil meminta kepada Presiden Joko Widodo agar mencabut larangan pejabat berbuka puasa bersama dengan alasan sedang menghadapi masa transisi pandemi Covid-19.

Larangan ini menunjukkan bahwa Presiden dinilai tidak peka dengan tradisi berbuka puasa yang merupakan kearifan lokal umat Islam di Indonesia.

Menurut Nasir, justru saat ini Indonesia sudah bebas dari pandemi Covid-19. Bahkan Presiden Jokowi dan para pejabat kementerian sudah tidak pernah lagi memakai masker beberapa bulan belakangan ini. Rapat-rapat di DPR RI juga saat ini sudah sangat sedikit yang memakai masker.

"Jangan-jangan larangan buka puasa bersama dikuatirkan oleh rezim akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang Pilpres", ujar Nasir.

Dikatakan, larangan itu sangat kontras dengan penyelenggaraan pesta perkawinan yang selama ini dilakukan oleh para pejabat, baik kementerian dan lembaga. Bahkan pesta anak Pak Jokowi di Solo juga menghadirkan banyak tamu undangan.

"Jadi dimana relevansinya pejabat dilarang buka puasa bersama. Saya menduga ini bukan orisinal ide Pak Jokowi.

Tapi ada pihak yang membisikkan kepada beliau", ujar Nasir yang juga politisi PKS itu.

Karena itu, sambung Nasir,

Pak Jokowi jangan ragu untuk mencabut larangan tersebut. Bulan Ramadhan adalah bulan kegembiraan dan kesempatan bagi pejabat untuk berbuka puasa bersama dengan masyarakat.

"Apapun alasan Pak Jokowi, melarang pejabat berbuka puasa bersama kurang sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan beliau", pungkas Nasir.

”

Justru saat ini Indonesia sudah bebas dari pandemi Covid-19. Bahkan Presiden Jokowi dan para pejabat kementerian sudah tidak pernah lagi memakai masker beberapa bulan belakangan ini. Rapat-rapat di DPR RI juga saat ini sudah sangat sedikit yang memakai masker. Jangan-jangan larangan buka puasa bersama dikuatirkan oleh rezim akan menjadi konsolidasi umat Islam menjelang Pilpres”,

**H.M. NASIR DJAMIL, M.Si**  
Anggota Komisi III DPR RI



## Fraksi PKS Minta Pemerintah Cabut Larangan Bukber

Jakarta (25/03) --- Fraksi PKS DPR meminta pemerintah meninjau kembali dan mencabut larangan buka puasa bersama bagi pejabat dan pegawai instansi pemerintah.

Larangan itu sendiri tertuang dalam surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 yang diteken Sekretaris Kabinet Pramono Anung pada Selasa (21/3). Adapun alasan yang tercantum, yakni karena saat ini masih dalam transisi pandemi Covid-19 menuju endemi.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyayangkan larangan tersebut karena sangat tidak arif dan tidak bijaksana. Mestinya pemerintah memahami semangat buka puasa bersama sebagai kearifan dan kultur umat Islam di Indonesia.

"Larangan meskipun itu ditujukan kepada pejabat dan pegawai negeri jelas tidak bijaksana bagi umat Islam yang sedang suka cita menyambut bulan ramadhan," kata Jazuli.

Menurut Anggota DPR Dapil Banten ini, tidak ada alasan kuat larangan buka puasa bersama karena faktanya kegiatan-kegiatan keramaian sudah dibuka semua termasuk dalam kunjungan-kunjungan presiden dan kegiatan berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Bahkan konser

musik di kota-kota besar dengan penonton puluhan ribu juga sudah diizinkan.

"Pemerintah harus arif memahami budaya dan tradisi bangsa sendiri yang sisi manfaatnya sangat besar. Buka puasa bersama bagi pegawai itu bisa jadi sarana pembinaan spiritual aparaturnya yang efektif sehingga bisa meningkatkan kualitas kinerja birokrasi karena tepat sarana dan momentumnya. Bukber juga bisa mengokohkan hubungan emosional antara atasan dan bawahan dalam suasana yang lebih cair," ungkapnya.

Selain itu, lanjut Jazuli, buka puasa bersama adalah

wujud nyata dari kerukunan, kebersamaan dan solidaritas sosial di kalangan masyarakat. Buka puasa bersama menumbuhkan semangat kekeluargaan yang hangat.

"Bukankah itu merupakan implementasi nyata dari nilai-nilai Pancasila?" tanya Jazuli.

Anggota Komisi I DPR ini meminta pemerintah membatalkan bleid larangan bukber tersebut daripada kontraproduktif dan menimbulkan kesan tidak baik di kalangan umat Islam. Sudah banyak tokoh dan ormas yang menyayangkan dan menyorankan serupa.

"Kalau pemerintah bijak seharusnya tidak perlu ada larangan-larangan seperti itu. Kan bisa saja malah dianjurkan dengan pelaksanaan yang sederhana tapi fokus pada esensinya. Jadi lebih baik surat tersebut ditarik atau dicabut," pungkas Jazuli.

"Kalau pemerintah bijak seharusnya tidak perlu ada larangan-larangan seperti itu. Kan bisa saja malah dianjurkan dengan pelaksanaan yang sederhana tapi fokus pada esensinya. Jadi lebih baik surat tersebut ditarik atau dicabut,"

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI



## **FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

*Kreatif, Atraktif, Substantif*

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



Larangan Berbuka Puasa  
Bersama,

## Aleg PKS: Kebijakan Tersebut Harus Ditinjau Ulang!

Jakarta (24/03) --- Anggota DPR Fraksi PKS, Almuzammil Yusuf meminta pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan larangan berbuka puasa bersama.

Kebijakan ini perlu ditinjau kembali karena di bulan Ramadhan seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memberikan pendidikan terkait iman dan ketakwaan lewat ceramah atau tausiyah.

"Pemerintah justru harus memanfaatkan dan harus meninjau ulang itu kebijakan tentang larangan berbuka puasa bersama. pemerintah harus memanfaatkan berbagai sarana, termasuk sarana Ramadhan ini Bulan Taqwa. Kita memanfaatkan dengan hal yang produktif sehingga ASN/PNS kita dapat memunculkan akhlak2 terbaik mereka. Sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu," tegas Anggota DPR Fraksi PKS ini.

Anggota DPR dari Dapil Lampung ini menjelaskan dengan jumlah umat Islam di Indonesia yang mencapai 85% dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Iman dan Taqwa perlu diwujudkan dan bahkan diamanatkan kepada pemerintah.

"Kalau kita menggapai taqwa, artinya juga memberikan kontribusi kebaikan kepada bangsa dan negara. Negara kita memiliki konstitusi yang mengamankan iman-taqwa itu perlu diwujudkan oleh

pemerintah," ujar Anggota DPR dari Dapil Lampung ini.

Muzzammil mengungkapkan amanat untuk mewujudkan iman dan taqwa ini tertulis dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 3.

"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, jadi Iman, Taqwa, cerdas, serta akhlak mulia diatur didalam Undang-Undang," ungkap Muzzammil.

Untuk mewujudkan amanat itu, Muzzammil mendorong agar setiap kegiatan dari ASN ataupun PNS di bulan Ramadhan ini, perlu berisi muatan-muatan pendidikan iman dan taqwa.

"Kegiatan ASN/PNS, dalam kegiatan2 formal-informal mereka harus membawa muatan iman-taqwa, akhlak mulia, dan kecerdasan. Terlebih kita bertemu di bulan Ramadhan. Berbuka puasa itu bisa diisi bukan hanya makan-makan tapi juga diisi dengan kegiatan ceramah dan tausiyah. Apalagi sekarang marak persoalan isu korupsi, isu money laundry, dan permasalahan lainnya. Momen inilah yang seharusnya dimanfaatkan oleh pemerintah," tegas Muzzammil.

Pelbagai alasan salah satunya adalah alasan Covid-19 yang diberikan pemerintah menurut Muzzammil tidaklah tepat, karena sebelumnya pemerintah telah membuat kegiatan yang mengundang massa banyak.

"Kalau alasannya covid

sudah sangat tidak tepat. beberapa waktu yang lalu sudah ada balap motor berlangsung mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu orang. Ada juga pesta pernikahan anak pejabat, ribuan orang, ada konser musik ratusan ribu orang," pungkas Muzzammil.



"Kalau alasannya covid sudah sangat tidak tepat. beberapa waktu yang lalu sudah ada balap motor berlangsung mencapai puluhan ribu hingga ratusan ribu orang. Ada juga pesta pernikahan anak pejabat, ribuan orang, ada konser musik ratusan ribu orang,"

**Dr. H. ALMUZAMMIL YUSUF, M.Si.**  
Anggota Komisi I DPR RI

Jakarta (21/03) --- Banyaknya aksi dan juga pernyataan sikap oleh kelompok masyarakat yang menolak rencana kedatangan Timnas Israel dalam perhelatan Piala Dunia U-20 di Indonesia, menurut Anggota Komisi 1 DPR RI Sukamta, perlu direspon secara positif oleh Pemerintah.

Menurut Sukamta, ini menunjukkan publik terus mendukung konsistensi pemerintah dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan Israel.

"Jadi jangan berpikiran negatif, tidak ada yang mengaitkan dengan alasan agama, tetapi semua murni karena ingin pemerintah konsisten dengan semangat Pembukaan UUD 1945. Penolakan ini juga bukan hal yang tidak mungkin, karena FIFA dan UEFA di tahun 2022 secara resmi melarang keikutsertaan Timnas Rusia dalam semua pertandingan sepakbola internasional dengan alasan Rusia melakukan invasi ke Ukraina."

Wakil Ketua Fraksi PKS ini memandang akan lebih banyak sisi positif yang didapatkan jika Pemerintah melarang kehadiran Israel dalam Piala Dunia U-20

"Pertama, pemerintah akan dinilai konsisten dalam memperjuangkan amanat konstitusi sekaligus Presiden

Jokowi akan tercatat dalam lembar sejarah sebagaimana pernah dilakukan Presiden Soekarno yang berani menolak kehadiran tim Israel dalam ajang Asian Games tahun 1962," ungkapnya.

Yang kedua, menurut Sukamta sikap tegas pemerintah Indonesia akan mendorong organisasi olahraga dunia berlaku adil (fair) dan tidak menerapkan standar ganda dalam kebijakannya.

"Jika secara aturan ada

kesepakatan negara penjahat dilarang ikut serta dalam turnamen internasional, semestinya diterapkan kepada setiap negara penjahat."

Selanjutnya menurut Sukamta, secara teknis dengan tidak hadirnya Timnas Israel tentu akan lebih meringankan pemerintah dalam melaksanakan pengamanan. Serta tentu saja akan mengakhiri polemik di tengah masyarakat.

"Suasana kondusif dibutuhkan untuk kesuksesan perhelatan Piala Dunia U-20. Kalau Timnas Israel dibolehkan hadir, dikhawatirkan polemik akan menguat. Untuk itu saya berharap pemerintah untuk bersikap tegas menolak kehadiran penjahat," tutup Sukamta.

“Suasana kondusif dibutuhkan untuk kesuksesan perhelatan Piala Dunia U-20. Kalau Timnas Israel dibolehkan hadir, dikhawatirkan polemik akan menguat. Untuk itu saya berharap pemerintah untuk bersikap tegas menolak kehadiran penjahat,

**H. SUKAMTA, Ph.D**

Anggota Komisi I DPR RI

**Wakil Ketua FPKS:  
Lebih Banyak  
Positifnya Jika  
Pemerintah Tegas  
Larang Kehadiran  
Timnas Israel U-20**







## PKS Geram di Rapat Bareng PPAK soal Rp 300 T: Rakyat Enek Bayar Pajak!

Jakarta (21/03) --- Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsy mencecar Kepala PPAK Ivan Yustiavandana terkait kejelasan isu adanya transaksi mencurigakan Rp 300 triliun lebih.

Habib mengatakan rakyat sampai enek membayar pajak gara-gara muncul isu ini di tubuh Kemenkeu.

"Saat ini publik sangat atensi besar terhadap dugaan adanya transaksi mencurigakan. Ini ngeri-ngeri nih. Sampai rakyat enek mau bayar pajak gara-gara begini nih," kata Habib Aboe dalam rapat bersama PPAK di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Habib pun menyinggung awal mula isu transaksi mencurigakan ini mencuat usai diberitakan oleh Menko Polhukam Mahfud MD.

Dia mempertanyakan soal dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ini disampaikan pernyataan yang berbeda dari sesama pejabat pemerintah.

"Jadi yang disebut itu sampai ratusan triliun. Kalau kita simak ya Pak Menko Polhukam itu menyampaikan bahwa transaksi 300 sampai berapa, naik terus angkanya. Pada perkembangan kemarin, Pak Menko menyampaikan ini

bukan korupsi tapi ini adalah data TPPU," kata Habib.

"Tapi Pak Irjen Kemenkeu menyampaikan bukan korupsi dan bukan TPPU. Kemudian, ini transaksi apa Pak Ivan? Ini jenis kelaminnya apa? Biar jelas," lanjut Habib.

Sekjen PKS ini mengingatkan jangan sampai

isu ini menuai kebingungan di publik. Dia meminta Ivan menjelaskan analisis dan pemeriksaannya terkait transaksi ini secara clear.

"Jangan sampai ini jadi pertanyaan publik. Saya minta ketegasan dari Pak Ivan untuk memberikan pernyataan yang clear. Data Rp 349 ini bermasalah apa tidak? Jika bermasalah, kaitannya dengan apa? Korupsi kah? TPPU kah? Penggelapan pajak kah? Supaya jelas," kata Habib.

“Jangan sampai ini jadi pertanyaan publik. Saya minta ketegasan dari Pak Ivan untuk memberikan pernyataan yang clear. Data Rp 349 ini bermasalah apa tidak? Jika bermasalah, kaitannya dengan apa? Korupsi kah? TPPU kah? Penggelapan pajak kah? Supaya jelas,”

**HABIB ABOE BAKAR  
ALHABSYI**

Anggota Komisi III DPR RI



## Bahas Problematika UU Advokat, Aleg PKS Dorong Penerapan Single Bar Antisipasi Advokat Nakal

Jakarta (21/03) - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Dimiyati Natakusumah menghadiri diskusi Quo Vadis Integrasi Advokat dalam UU Advokat yang diselenggarakan di ruang Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta (21/03).

"Ketika kita berbicara terkait dengan negara hukum, langsung pikiran kita tertuju kepada dua hal, yaitu rule of law atau rechtsstaat", ujar Dimiyati.

Problem terkait dengan revisi UU Advokat yang pernah dilakukan adalah terdapat pada apakah organisasi advokat harus single bar atau multibar. Idealnya organisasi advokat dibuat single bar hanya pada sektor lembaga pengawas kode etik dan pendidikan advokat.

"Seyogianya organisasi advokat memiliki suatu lembaga atau organisasi khusus terkait dengan pengawasan kode etik dan pendidikan profesi advokat, sehingga para calon dan advokat di Indonesia memiliki lembaga penegakan kode etik yang tegas demi melindungi kewibawaan profesi advokat serta dengan adanya organisasi khusus dalam bidang pendidikan advokat dapat memperbaiki kualitas dari para yuris, " Tegasnya.

Lembaga single bar dalam proses penegakan kode etik ini sangat diperlukan bagi

organisasi advokat di Indonesia untuk melindungi kewibawaan daripada profesi advokat yang memiliki julukan sebagai profesi yang mulia atau officium nobile.

Sehingga diharapkan ke depan, para advokat di Indonesia memiliki kualitas yang terus menerus bertambah baik sehingga hal tersebut akan berdampak kepada penegakan keadilan yang semakin baik.

"Tidak akan tercapai penegakan kode etik yang tegas bagi para oknum advokat nakal jika kita tidak memiliki lembaga single bar dalam bidang penegakan kode etik profesi advokat, " Tutup Dimiyati.

"Seyogianya organisasi advokat memiliki suatu lembaga atau organisasi khusus terkait dengan pengawasan kode etik dan pendidikan profesi advokat, sehingga para calon dan advokat di Indonesia memiliki lembaga penegakan kode etik yang tegas demi melindungi kewibawaan profesi advokat serta dengan adanya organisasi khusus dalam bidang pendidikan advokat dapat memperbaiki kualitas dari para yuris,

**DR. H. R. A. DIMIYATI  
NATAKUSUMAH, SH, MH**  
Anggota Komisi III DPR RI



## Nasir Djamil: Kalau Pemerintah Ada Kemauan, Maka Akan Jalan RUU Perampasan Aset

Jakarta (02/04) --- Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menegaskan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana merupakan RUU yang diusulkan pemerintah.

Karena itu, ia menekankan pembahasan RUU tersebut hanya akan jalan kalau pemerintah ada kemauan, yaitu mengirimi draf Naskah Akademik dan RUU tersebut kepada DPR.

"Belum bergerak dia (RUU Pemberantasan Aset). Jadi kalau memang pemerintah ada kemauan, maka akan ada jalan. Kalau tidak mau, tidak ada jalan. Ini RUU-nya usul pemerintah," ujar Nasir Djamil saat dihubungi Parlemen, Sabtu (1/4/2023).

Meskipun demikian, ia menekankan bahwa RUU Perampasan Aset ini juga harus diiringi dengan penegakan hukum yang berintegritas dan terintegrasi. Sebab, tanpa dua hal tersebut, maka RUU ini, menurutnya, hanya akan menjadi momok yang menakutkan bagi semua orang.

"Karena itu, menurut saya memang RUU Perampasan Aset itu dibutuhkan," jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Ia menjelaskan yang dimaksud dengan penegakan hukum berintegritas adalah melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan

Kemenkumham. Sedangkan, penegakan hukum yang berintegritas adalah penegakan hukum yang memang berdasarkan sistem, bukan karena ada kasus viral terlebih dahulu baru ada penegakan hukum.

"Kalau tidak ada jaminan seperti itu, saya khawatir UU ini akan dijadikan senjata untuk menembak orang yang belum tentu bersalah. Menembak

lawan politik atau orang yang berteman dengan lawan politik. Jadi, harus dipastikan dulu penegakan hukum kita ini. Jadi kalau penegakan hukum ini sudah berintegritas, maka kita percaya dengan penegakan hukum itu," tegasnya.

Komisi III, tegasnya, siap jika ditugaskan Badan Musyawarah untuk melakukan pembahasan RUU tersebut dengan pemerintah. "Itu kan tergantung Bamus nanti, siapa yang menugaskan pembahasan RUU tersebut. Apakah Pansus, Komisi III, atau Baleg, tapi kan dia (RUU Pemberantasan Aset) bukan prioritas tahunan, dia hanya long list," tutupnya.

“Kalau tidak ada jaminan seperti itu, saya khawatir UU ini akan dijadikan senjata untuk menembak orang yang belum tentu bersalah. Menembak lawan politik atau orang yang berteman dengan lawan politik. Jadi, harus dipastikan dulu penegakan hukum kita ini. Jadi kalau penegakan hukum ini sudah berintegritas, maka kita percaya dengan penegakan hukum itu,”

**H.M. NASIR DJAMIL, M.Si**  
Anggota Komisi III DPR RI



# Aleg PKS Ingatkan Pemerintah Jangan Jadikan Ancaman Cuaca Ekstrim Alasan Impor Beras

Jakarta (29/03) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menanggapi soal polemik prediksi produksi beras yang dinilai terus menurun akibat cuaca ekstrim yang menyebabkan banjir dan gagal panen di sejumlah areal produksi padi.

Namun anehnya, kata Johan, di sisi lain Pemerintah selalu mengklaim bahwa produksi aman dan cukup, hal ini diutarakannya merespon rencana impor beras 2 juta ton pada tahun ini.

"Pemerintah jangan menjadikan ancaman cuaca ekstrim sebagai pembenaran untuk melakukan impor beras sebab memang benar cuaca berpotensi mengganggu produksi namun pemerintah harusnya menggerakkan petani untuk bekerja keras memproduksi gabah atau beras dengan cara memberikan perlindungan

dan kebijakan yang berpihak pada petani bukan dengan kebijakan impor yang malah membuat petani semakin sengsara dan kesulitan meningkatkan produksinya" ujar Johan.

Politisi Senayan ini meminta pemerintah selalu waspada terhadap ancaman gagal produksi pangan akibat faktor iklim sebab menurutnya mulai akhir maret hingga pertengahan agustus 2023 nanti iklim akan mengarah normal namun akan memasuki El Nino atau iklim kemarau berkepanjangan, dimana

banyak ahli memprediksi produksi padi turun dengan kisaran 5 persen.

"Kewaspadaan pangan yang dibuat pemerintah tidak boleh dengan cara impor beras dan impor pangan lainnya sebab impor ini harus dibatalkan demi membuat petani kita lebih bergairah dan bersemangat di tengah ancaman cuaca yang tidak menentu," ucap Johan.

Menurutnya pemerintah harus menghitung dengan cermat rasio produksi terhadap konsumsi beras dengan data yang akurat sehingga tidak gegabah memutuskan impor beras.

"Saya menilai pemerintah harus sadar bahwa kebijakan penurunan anggaran kementerian secara tajam dan juga subsidi pupuk yang juga turun serta harga pupuk nonsubsidi yang melonjak 2-3 kali lipat telah berdampak signifikan menyebabkan produksi Pertanian tidak naik padahal iklim saat ini sebenarnya sangat mendukung," ungkap Johan.

Anggota Fraksi PKS ini dengan tegas menolak kebijakan impor beras terutama saat panen raya dan terus menyalahkan terjadinya peningkatan impor komoditas pangan lainnya mulai dari jagung hingga kedelai.

"Kita menilai bahwa pemerintah ngotot melakukan impor beras telah berdampak sangat buruk bagi petani dan

faktanya berdampak meningkatnya kemiskinan di pedesaan, peralihan penguasaan lahan dari masyarakat desa ke pemodal dan hancurnya kedaulatan pangan nasional. Jadi kita lihat tidak ada gunanya anggaran untuk mengatasi kemiskinan begitu besar namun dirusak oleh kebijakan impor yang malah membuat angka kemiskinan semakin meningkat", sesal Johan.

Wakil Rakyat dari Pulau Sumbawa ini mengingatkan pemerintah bahwa tahun ini pangan pokok kita mengalami ancaman serius karena terjadinya musim tanam dan panen pertama justru terancam oleh curah hujan yang tinggi, banjir dan hama di sebagian wilayah sentra produksi pangan.

"Sebagai catatan bahwa produksi padi kita hanya meningkat sedikit pada 2020 lalu sebesar 0,09%; kemudian menurun 0,42% (2021) dan sedikit meningkat 0,61% pada tahun 2022 lalu. Maka keseriusan pemerintah menjadi kunci bagi upaya peningkatan produksi padi ke depan di tengah ancaman cuaca ekstrim dan diperlukan kepekaan pemerintah terhadap nasib jutaan petani dengan cara membatalkan rencana impor beras," demikian tutup Johan Rosihan.

"Saya menilai pemerintah harus sadar bahwa kebijakan penurunan anggaran kementerian secara tajam dan juga subsidi pupuk yang juga turun serta harga pupuk nonsubsidi yang melonjak 2-3 kali lipat telah berdampak signifikan menyebabkan produksi Pertanian tidak naik padahal iklim saat ini sebenarnya sangat mendukung,"



**H. JOHAN ROSIHAN, S.T**  
Anggota Komisi IV DPR RI



## Legislator PKS Kritik Keras Rencana Pemerintah Impor Beras 500 Ribu Ton lagi

Jakarta (17/03) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Slamet mengkritik keras pernyataan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan mengenai rencana impor beras 500.000 ton pada tahun 2023 ini.

Wacana tersebut, terang Ketua umum Rumah Petani Nelayan Nusantara (RPNN) berpotensi membuat gejolak harga beras dalam negeri yang saat ini sedang memasuki masa panen raya.

Meskipun Mendag mengungkapkan hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga beras dan menjaga stok CBP bulog namun menurut politis PKS tersebut apa yang disampaikan Mendag akan membuat banyak spekulasi di lapangan yang akan memanfaatkan momen untuk membeli gabah petani dengan harga murah.

"Saya terus terang tidak habis pikir apa yang disampaikan oleh Kemendag tersebut. Saat ini petani kita sedang panen raya dan dengan adanya isu impor tersebut dikhawatirkan akan menekan harga gabah hingga titik terendah," ujarnya di Jakarta Kamis (16/03).

Anggota legislatif dari kabupaten/kota Sukabumi ini meminta pemerintah untuk tidak membuat gaduh disaat petani sedang musim panen raya dengan melemparkan isu impor.

Menurutnya importasi beras bukanlah solusi untuk menekan harga karena pada bulan November 2022 hingga Februari 2023 pemerintah sudah mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton dengan alasan yang sama yaitu untuk menekan harga beras di pasaran.

"Jika sekarang harga masih tetap mahal berarti impor bukanlah solusinya. Pemerintah seharusnya menggalakkan sidak di lapangan untuk mengejar para penjahat pemburu rente beras yang diduga membeli beras Bulog

dengan harga murah dalam jumlah besar kemudian mengoplosnya lalu dijual dengan harga beras medium dipasaran," tegas Slamet.

Sebelumnya Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan secara gamblang menyampaikan dalam Rapat Kerja antara Kemendag dengan komisi VI DPR RI (15/03) Pemerintah telah menyepakati dapat sewaktu-waktu mengimpor beras sejumlah 500.000 ton untuk mengantisipasi lonjakan harga serta mengamankan stok beras bulog yang menurutnya saat ini tinggal 300 ribu ton.

Meskipun Mendag mengklaim bahwa dirinya tidak begitu setuju dengan impor beras namun langkah tersebut tidak bisa dihindari mengingat tidak terkendalinya harga beras saat ini.

"Saya terus terang tidak habis pikir apa yang disampaikan oleh Kemendag tersebut. Saat ini petani kita sedang panen raya dan dengan adanya isu impor tersebut dikhawatirkan akan menekan harga gabah hingga titik terendah,"

**dr. H. SLAMET**  
Anggota Komisi IV DPR RI



## Penangkapan Ikan Terukur Diberlakukan,

# Aleg PKS : Perlu Perlindungan dan Keadilan bagi Nelayan Tradisional

Jakarta (24/03) --- Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) secara resmi mulai berlaku setelah disahkan oleh Pemerintah Indonesia.

Kebijakan yang diatur lewat Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tersebut menjadi penanda jika zona penangkapan ikan dan basis kuota penangkapan yang mendasari kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) akan diperlakukan.

Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty meminta agar penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) memperhatikan keadilan bagi para nelayan.

"Kebijakan penangkapan ikan terukur masih meminggirkan nelayan tradisional atau nelayan lokal", tegas anggota Fraksi PKS DPR RI, Saadiah Uluputty di Jakarta

(23/03/2023).

Saadiah menilai, Nelayan akan tersisih dan tidak mendapat porsi yang adil. Kebijakan PIT cenderung akan menguntungkan pemilik modal besar ataupun korporasi perikanan.

"Pemerintah menggaungkan asas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan pondasi utamanya adalah asas pemerataan, asas peran serta masyarakat serta asas keadilan. Namun Kebijakan PIT akan menempatkan para nelayan dalam posisi tidak berdaya", tegas Saadiah.

Secara khusus, Saadiah meminta agar perlindungan dan

pemberdayaan kepada para nelayan terkhusus nelayan tradisional diberikan oleh pemerintah. Apalagi terdapat proporsi penerapan kuota.

"Kebijakan penangkapan ikan terukur belum memiliki dasar tentang asal muasal penetapan kuota dan tidak ada kejelasan metode dalam menghitung potensi sumber daya ikan", imbuhnya.

Pemberlakuan Kebijakan PIT kata Saadiah, mesti dibarengi dengan mekanisme pengawasan yang harus dilakukan secara ketat. Jika tidak, akan mengancam keberlanjutan nelayan tradisional.

Dia lalu membeberkan adanya fakta aktifitas usaha eksploitasi skala besar dan modern dengan alat tangkap yang tidak berkelanjutan di wilayah perairan pulau - pulau kecil. Termasuk di Propinsi Maluku.

"Ini contoh dimana pengawasan cukup lemah. Jika kebijakan PIT dilakukan, harus diikuti dengan sistem pengawasan yang memadai dan paripurna. Jika tidak, dampaknya akan mengancam keberlanjutan nelayan tradisional", tegasnya.

Saadiah menilai, soal yang sering muncul dalam kebijakan PIT adalah penegakan aturan untuk memastikan, zona penangkapan ikan terukur ditaati oleh pelaku usaha.

Maka tegasnya, pengawasan mesti diikuti dengan penerapan reward dan punishment yang jelas dan tegas.

"PP Nomor 11 Tahun 2023 terkait Penangkapan Ikan Terukur telah mengatur tentang sanksi administratif atas pelanggaran terhadap

penetapan zona penangkapan ikan. Namun tidak cukup sampai di situ. Pemerintah mesti memberlakukan reward dan punishment bagi korporasi agar niat untuk PIT memberi nilai tambah dan daya saing hasil perikanan bagi negara dapat diwujudkan", desaknya.



"Pemerintah menggaungkan asas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan pondasi utamanya adalah asas pemerataan, asas peran serta masyarakat serta asas keadilan.

Namun Kebijakan PIT akan menempatkan para nelayan dalam posisi tidak berdaya",

**SAADIAH ULUPUTTY, S.T**

Anggota Komisi IV DPR RI



## Aleg PKS: Andai Dana Transaksi Mencurigakan Rp.349 T pada Dirjen Pajak untuk Sektor Strategis Pangan

Jakarta (25/03) --- Polemik transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah menjadi perbincangan publik.

Terlepas dari pro kontra apakah dana tersebut pencucian uang atau korupsi, Anggota Komisi IV DPR Hermanto menghendaki agar dana tersebut segera diselesaikan secara tuntas dan dialihkan ke dalam sistem APBN mengingat dana tersebut sangat besar.

"Dana Rp 349 triliun itu lebih dari sepuluh kali lipat dari total anggaran tiga kementerian yang mengurus pangan", ujar Hermanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan.

Tiga kementerian yang mengurus pangan adalah: Kementerian Pertanian (Kementan) anggarannya 14,45 triliun, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 6,29 triliun dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 6,91 triliun.

"Total anggaran ketiga kementerian tersebut hanya 27,65 triliun", ucap Hermanto.

Sektor pangan, lanjut Hermanto, merupakan sektor strategis menyangkut hidup matinya bangsa. Namun proses penambahan anggaran untuk pangan sangat sulit.

"Bila dana Rp 349 triliun tersebut dialokasikan ke sektor

pangan, tentu dapat segera mewujudkan kedaulatan pangan dan mensejahterakan petani", papar legislator dari Fraksi PKS DPR RI ini.

Menurut Hermanto, bila dana Rp 349 triliun tersebut sebagian dialokasikan untuk sektor pangan maka banyak hal yang dapat diatasi diantaranya: kelangkaan pupuk, infrastruktur pertanian, penyediaan bibit dan benih yang berkualitas serta alat dan mesin pertanian. "Juga dapat memperbaiki mekanisme harga pangan di pasar", ucapnya.

Bila dana Rp 349 triliun tersebut sebagian dialokasikan untuk sektor pangan maka banyak hal yang dapat diatasi diantaranya: kelangkaan pupuk, infrastruktur pertanian, penyediaan bibit dan benih yang berkualitas serta alat dan mesin pertanian. "Juga dapat memperbaiki mekanisme harga pangan di pasar",

**Dr. HERMANTO, S.E., M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

Heboh transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan berawal dari pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD.

"Dana tidak wajar tersebut mengundang perhatian masyarakat dengan beragam opini. Publik menghendaki transparansi status dana tersebut apakah kategori tindak pidana korupsi, (TPPU) atau korupsi," ungkapnya.

Hermanto minta Presiden Jokowi secara serius mendorong penyelesaian dana tak wajar tersebut dengan prinsip keadilan alokasi anggaran kepada sektor strategis pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan.



# PKS KONSISTEN TOLAK RUU DAN PERPU CIPTA KERJA, SENGSARAKAN RAKYAT DAN CEDERAI KONSTITUSI!

**3 Oktober 2020**

FPKS tolak penetapan RUU Cipta Kerja dalam Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I di Badan Legislasi DPR



**5 Oktober 2020**

FPKS tolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU dalam Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna

**30 Desember 2022**

Presiden Jokowi menerbitkan Perpu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

**1 Januari 2023**

FPKS menilai penerbitan Perpu Cipta Kerja inkonsisten dengan Putusan MK dalam Perkara Pengujian Formil UU Cipta Kerja

OMNIBUS LAW



**21 Maret 2023**

FPKS menolak penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan walk out dari rapat paripurna



**14 Maret 2023**

Pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, FPKS menyatakan bahwa Perpu Cipta Kerja harus dicabut karena sudah melampaui waktu yang ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang

**15 Februari 2023**

Penolakan FPKS terhadap Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang pada Rapat Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I di Badan Legislasi DPR yang dibacakan oleh Amin, Ak.







## Komisi V FPKS: Stop Investasi Jalan Tol, Perbaiki Jalan Nasional!

Jakarta (29/03) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS Sigit Sosiantomo mendesak pemerintah menghentikan investasi pembangunan jalan tol menggunakan APBN dan mengalihkan anggarannya untuk memperbaiki jalan nasional yang kemantapannya semakin menurun.

Hal itu disampaikan Sigit dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Badan Penyelenggara Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Selasa (28/03/2023).

Sigit menilai kebijakan pemerintah yang memprioritaskan pembangunan jalan tol berdampak pada penurunan kemantapan jalan nasional.

"Kebijakan pemerintah yang memprioritaskan investasi pada jalan tol berdampak sistemik pada kemantapan jalan nasional. Saat ini, target kemantapan jalan nasional kita tidak dapat tercapai, bahkan saat ini kondisi kemantapan

jalan kita dibawah tahun 2019." Kata Sigit, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FKPS) untuk dapil Jatim 1.

Berdasarkan data PUPR, kata Sigit, Untuk kemantapan jalan, capaian tahun 2020-2022 baru tercapai 0,9% kemantapan jalan. Tahun 2020 kemantapan jalan sebesar 91,27% dan capaian kumulatif 2022 sebesar 92,18%.

"Tahun 2019 kemantapan jalan sudah menapai 92,81% tapi di 2020 turun jadi 91,27%. Pada waktu itu pandemi dan mobilitas baik penumpang dan barang juga turun. Namun, karena anggaran preservasi

teralihkan untuk invest jalan tol, akibatnya kepentingan masyarakat dalam pemenuhan hak pelayanan dasarnya jadi terabaikan pemerintah," Kata Sigit.

Karena itu, Sigit mendesak pemerintah untuk menghentikan investasi jalan tol dengan dana APBN dan dikembalikan untuk perbaikan dan pembangunan jalan nasional sebagai pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan dasar.

"Saya setuju jika komisi V membentuk panja untuk mendudukkan kembali persoalan pembangunan jalan sebagaimana diamanatkan UU. Pemerintah wajib menyediakan jalan nasional yang mantap sebagai pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan dasar dan sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan karena kerusakan jalan berkontribusi besar pada kecelakaan lalu lintas." Kata Sigit.

Sigit mengatakan menurut data dari Kepolisian RI pada tahun 2019, sebanyak 17,89% kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor kondisi jalan yang buruk. Beberapa studi dan penelitian juga menunjukkan bahwa jalan yang rusak dapat mengakibatkan peningkatan kecelakaan lalu lintas. Misalnya, sebuah studi yang dilakukan di California pada tahun 2017 menemukan bahwa 42%

kematian akibat kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut terjadi pada jalan-jalan yang rusak.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga mengkritik penetapan tarif tol yang menurutnya tidak fair dengan SPM jalan tol yang seharusnya dipenuhi oleh operator. Sebagai contoh, Sigit menyebutkan jalan dengan tingkat kepadatan tinggi dan sering perbaikan seperti tol Japek dan tol cipali serta tol Pemalang Pejangan harus lebih murah per km nya dibanding ruas tol lainnya.

"Tarif yang berlaku sekarang mahal jika dibandingkan dengan SPM yang diberikan. Banyak tol yang sedang diperbaiki sehingga mengganggu perjalanan dan menyebabkan kemacetan. Seharusnya tarif per KM nya lebih murah dari tol yang sangat lancar," Kata Sigit.

"Saya setuju jika komisi V membentuk panja untuk mendudukkan kembali persoalan pembangunan jalan sebagaimana diamanatkan UU. Pemerintah wajib menyediakan jalan nasional yang mantap sebagai pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan dasar dan sekaligus menjaga keselamatan pengguna jalan karena kerusakan jalan berkontribusi besar pada kecelakaan lalu lintas."

**Ir. H. SIGIT  
SOSIANTOMO**  
Anggota Komisi V DPR RI





## Antisipasi Kenaikan Tiket, Aleg PKS Minta Kemenhub Tambah Kuota Mudik Gratis

Aleg PKS Pusat ini menyebutkan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 26,36 juta orang per September 2022. Jumlah ini naik dibandingkan pada akhir Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang.

Tasikmalaya (14/03) – Menanggapi rencana program mudik gratis Ramadhan 2023, Anggota Komisi V DPR RI asal Fraksi PKS berharap kuota Bus yang disiapkan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bertambah jumlahnya.

“Ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan untuk menambah kuota. Pertama prediksi terjadi lonjakan jumlah pemudik. Kedua potensi tingginya kenaikan harga tiket semua moda transportasi publik. Ketiga pertumbuhan ekonomi yang masih melambat pasca pandemi,” ulas Toriq Hidayat.

Aleg PKS Pusat ini menyebutkan bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 26,36 juta orang per September 2022. Jumlah ini naik dibandingkan pada akhir Maret 2022 sebanyak 26,16 juta orang.

“Bercermin dari beberapa

kondisi diatas. Maka antisipasi harus dilakukan oleh Kemenhub dengan menambah kuota mudik gratis untuk kegiatan lebaran tahun ini. Kalau tahun 2022 mampu menyewa armada sebanyak 686 bus. Untuk 2023, jumlahnya tidak boleh dibawah ini,” pungkas Toriq.

Toriq juga menambahkan,

bahwa jumlah bus yang Kemenhub sewa saat mudik gratis tahun 2019 yaitu 1.350 bus untuk 54.000 penumpang. Kalau pun belum dapat menamai jumlah kuota sebagaimana 4 tahun lalu. menurutnya, minimal jelang lebaran tahun ini Dirjen Hubdat mampu menyiapkan 1.000 bus.

“Kehadiran Pemerintah secara maksimal pada setiap kegiatan mudik. Yakin memberikan bantuan, kemudahan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat akan membawa dampak ekonomi mikro di daerah. Sekaligus menjaga tali persaudaraan dan persatuan,” tutup Toriq.

“Bercermin dari beberapa kondisi diatas. Maka antisipasi harus dilakukan oleh Kemenhub dengan menambah kuota mudik gratis untuk kegiatan lebaran tahun ini. Kalau tahun 2022 mampu menyewa armada sebanyak 686 bus. Untuk 2023, jumlahnya tidak boleh dibawah ini,”

**KH. TORIQ HIDAYAT, Lc**  
Anggota Komisi V DPR RI



## Pemerintah Diwanti-Wanti Serius Antisipasi Peningkatan Jumlah Pemudik

Mudik Lebaran tahun 2023 diperkirakan merupakan mudik terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. Mengingat sudah hampir tiga tahun lamanya masyarakat Indonesia tidak mudik, kemudian juga adanya kerinduan dari masyarakat untuk bertemu dengan keluarga masing-masing. Termasuk, juga mulai membaiknya perekonomian nasional pasca pandemi Covid-19. Oleh karena itu, jumlah pemudik yang sangat besar tersebut harus betul-betul diantisipasi secara serius oleh Pemerintah.

Demikian disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama saat diwawancarai Parlemenaria di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kepala BPJT Kementerian PUPR dengan menghadirkan Perusahaan Operator Jalan Tol Seluruh Indonesia. RPD tersebut memiliki agenda pembahasan mengenai permasalahan pengelolaan jalan tol di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

“Maka (mudik) tidak boleh terganggu karena ada kemacetan atau mungkin karena ada gangguan di jalan seperti keselamatan, kemudian juga kenyamanan agar warga yang mudik itu betul-betul bisa difasilitasi oleh Pemerintah.

Mudik ini kan sebetulnya setiap tahun ya, kecuali pada saat pandemi kemarin. Oleh karena itu, beberapa kesalahan berulang seharusnya tidak

boleh terjadi lagi, misalnya ada kemacetan di titik tertentu karena sosialisasi tentang misalnya subsidi angkutan bus,” ujarnya.

Demikian juga, sambungnya, adanya pengalihan arus yang tidak diketahui oleh publik dari awal sehingga terjadi penumpukan di titik-titik tertentu. Selain itu, ia mewanti-wanti rest area jalan tol jangan sampai tidak memadai kapasitas tempat parkirnya sehingga terjadi penumpukan yang menyebabkan kemacetan.

“Nah, kesalahan ini berulang setiap tahun dan ini harus diperbaiki. Standar Pelayanan Minimum (SPM) di jalan-jalan ini harus diperbaiki supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti tahun-tahun sebelumnya,” tegas Legislator Fraksi PKS ini.

“Maka (mudik) tidak boleh terganggu karena ada kemacetan atau mungkin karena ada gangguan di jalan seperti keselamatan, kemudian juga kenyamanan agar warga yang mudik itu betul-betul bisa difasilitasi oleh Pemerintah. Mudik ini kan sebetulnya setiap tahun ya, kecuali pada saat pandemi kemarin.

**H. SURYADI JAYA PURNAMA, S.T**

Anggota Komisi V DPR RI

Rutin Impor KRL Bekas  
dari Jepang,

## Aleg PKS: Sampai Kapan Dalam Negeri Bisa Produksi?

JAKARTA—Anggota DPR RI Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina, mempertanyakan kapan bangsa Indonesia ini mampu memproduksi kereta listrik yang selama ini rutin mengimpor KRL bekas dari Jepang sejak tahun 2000

Hal ini ia sampaikan pada rapat dengar pendapat komisi VI dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia/KCI, dan Direktur Utama PT INKA (Persero) beserta jajarannya.

Nevi mengatakan, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB).

"Saya mendengar akan ada masuk berupa 120 unit KRL tipe E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 unit KRL dengan tipe yang sama untuk

kebutuhan 2024. Seharusnya Perusahaan sudah memahami tentang kebutuhan akan KRL setiap tahunnya. Saya mempertanyakan, pengadaan import ini juga bagian dari Milestone pengadaan KRL 2012 2026 atau kebutuhan yang tiba tiba?" kata Nevi mempertanyakan.

Politisi PKS ini mengingatkan, Rencana mengimpor KRL bekas dari Jepang ini mendapat penolakan dari Kementerian perindustrian karena tidak memenuhi Syarat Minimal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Nevi menyayangkan,

Selain mengimpor rangkaian KRL eks Jepang pada tahun 2023-2024, KCI telah berkomitmen membeli rangkaian KRL baru buatan INKA senilai Rp 4 triliun. Kontrak pengadaan kereta buatan domestik itu baru akan diteken pada bulan Maret 2023 tapi selesai produksinya nanti pada tahun 2025-2026.

"Saya mengakui bahwa impor menjadi lebih murah saat ini bila dibandingkan memproduksi sendiri dari dalam negeri. Ini merupakan peringatan bahwa industri kita mesti diperbaiki dan menjadi tantangan, harus ada limit waktunya kita import terus kereta listrik ini," pinta Nevi,

Legislator asal Sumatera Barat ini mendorong PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) dan PT Kereta Commuter Indonesia/KCI untuk mendahulukan produksi industri kereta dalam negeri dan memperhatikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi dalam menyediakan sarana transportasi masyarakat.

"Yang tidak kalah penting adalah menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi masyarakat. Semua efisiensi dan efektifitas mesti terus dilakukan baik dari segi sarana fisik, manajemen hingga pelayanan kepada masyarakat," tutup Nevi.



"Saya mengakui bahwa impor menjadi lebih murah saat ini bila dibandingkan memproduksi sendiri dari dalam negeri. Ini merupakan peringatan bahwa industri kita mesti diperbaiki dan menjadi tantangan, harus ada limit waktunya kita import terus kereta listrik ini,

**Hj. NEVI ZUAIRINA**  
Anggota Komisi VI DPR RI

# Kebakaran Beruntun Obyek Vital, Aleg PKS Desak Menteri BUMN Evaluasi Direksi dan Komisaris Pertamina

Jakarta (02/04) — Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Amin Ak mengatakan, berulangnya peristiwa kebakaran berbagai obyek vital yang dikelola Pertamina menandakan ada masalah serius di tubuh Pertamina.

Amin pun mendesak Menteri BUMN agar mengevaluasi Direksi dan Komisaris Pertamina sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Meledak dan terbakarnya berbagai obyek vital secara berturut-turut mulai dari kebakaran kilang Cilacap, kemudian kilang Balikpapan, kilang Balongan, depo Plumpang, dan kilang minyak Dumai. Bahkan kebakaran juga terjadi pada kapal tanker pengangkut BBM.

"Mengapa manajemen

Pertamina seperti tidak peduli dan tidak pernah mau belajar dari kecelakaan beruntun ini sehingga standar keamanan obyek vital begitu buruk. Atau sebetulnya ada masalah lain," tanya Amin.

Beragam spekulasi terkait penyebab meledak dan terbakarnya berbagai fasilitas vital tersebut hingga saat ini tidak pernah dijawab tuntas oleh Pertamina.

Amin Ak khawatir persoalan ini bukan sekedar menyangkut sistem keamanan

kilang minyak. Kecelakaan bergilir semacam itu seakan terjadi secara sistemik, dan ini harus segera dijawab dan dipertanggungjawabkan oleh direksi dan komisaris Pertamina.

"Kilang minyak itu merupakan fasilitas vital dan strategis dan bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak menjadi aneh karena secara bergiliran dan beruntun terus terbakar," ujarnya.

Yang jelas, bukan hanya kerugian yang diderita Pertamina akibat hal itu. Namun juga semakin menjauhkan Pertamina dari upaya membangun kemandirian pengolahan minyak di dalam negeri.

"Lha kalau setiap tahun ada kilang terbakar, bahkan lebih dari sekali, bagaimana Pertamina mau melakukan lompatan besar dalam upaya meminimalisir impor BBM maupun produk turunan migas lainnya?" kata Amin.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, sudah semestinya kilang minyak itu memiliki protokol pengoperasian, pemeliharaan dan pengamanan yang ketat.

Di antaranya dalam upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi kebakaran, terlebih Pertamina mengklaim sudah sesuai standar internasional.

"Harus dilakukan audit terhadap teknologi dan sistem keamanan kilang minyak Pertamina untuk memastikan

apakah sudah sesuai dengan standar pengamanan obyek vital," kata Amin.

Sementara untuk mencegah spekulasi, terutama tuding adanya motif perburuan rente ditengah melonjaknya konsumsi bahan bakar minyak, Komisi VI DPR akan meminta penjelasan Direksi Pertamina.

Terlebih, Amin menambahkan, kebakaran ini terjadi menjelang Lebaran dan liburan panjang di mana

kebutuhan BBM sangat tinggi. Seperti diketahui, kilang Dumai bukan hanya memproduksi berbagai jenis BBM, namun juga memproduksi avtur dan LPG.

"Konsumsi BBM, Avtur dan LPG saat Lebaran biasanya naik, Pertamina harus punya exit strategi guna mencegah kelangkaan pasokan BBM, tanpa merugikan masyarakat maupun membebani keuangan negara," pungkasnya.



"Mengapa manajemen Pertamina seperti tidak peduli dan tidak pernah mau belajar dari kecelakaan beruntun ini sehingga standar keamanan obyek vital begitu buruk. Atau sebetulnya ada masalah lain,"

**AMIN AK, M.M.**  
Anggota Komisi VI DPR RI



# Wakil Ketua FPKS Minta Pertamina Pastikan Stok BBM Aman Jelang Idul Fitri

Jakarta (31/03) — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta Pertamina menjamin ketersediaan dan kelancaran distribusi BBM di bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri.

Karena itu, kata Mulyanto, Pertamina harus menghitung jumlah kebutuhan BBM sekaligus mempersiapkan proses produksinya.

"Pertamina harus bisa mengantisipasi lonjakan permintaan BBM di berbagai daerah selama Ramadhan dan jelang hari raya Idul Fitri, terutama terkait kebutuhan BBM saat musim mudik. Mumpung masih ada waktu sebaiknya Pertamina dapat mempersiapkan kebutuhan tersebut dengan baik," demikian kata Mulyanto saat memimpin delegasi Komisi VII DPR RI Kunjungan Kerja Spesifik ke UID PLN Banten,

Kamis (30/3/2023).

Dalam kunjungan tersebut juga dilaksanakan rapat dengan PT. Pertamina, PLN, BPH Migas, Kementerian ESDM serta Hiswana Migas dalam rangka mengetahui kesiapan Pemerintah untuk memenuhi kecukupan BBM, gas LPG dan listrik di bulan Ramadhan dan dalam rangka menyambut datangnya hari raya leduh Fitri.

"Secara umum Pertamina maupun PLN di wilayah Banten sudah siap mengantisipasi lonjakan kebutuhan tersebut. Dari sisi cadangan operasional di tingkat terminal untuk bensin dan solar masing-masing dilaporkan sebesar 26 hari dan

9 hari. Sementara cadangan di tingkat SPBU untuk bensin dan solar sebesar 2,4 hari," jelasnya.

Sementara untuk aspek distribusi dilaksanakan penambahan titik-titik distribusi baik berupa SPBU Siaga, Agen dan Outlet LPG Siaga, Motorist dan SPBU Kantong.

"Yang perlu mendapat perhatian adalah distribusi solar, khususnya solar bersubsidi. Selain cadangan operasionalnya yang hanya 9 hari, volume penjualan juga sudah over kuota. Bila kebutuhan rata-rata sesuai dengan data bulan terakhir, apalagi kalau meningkat maka diperkirakan untuk tahun 2023 akan terjadi over kuota. Begitu pula untuk LPG tiga kilogram menunjukkan trend serupa terjadi over kuota. Ini perlu mendapat perhatian khusus Pemerintah dan Pertamina," jelas Mulyanto.

Hal penting yang perlu mendapat perhatian menurut Mulyanto adalah terkait implementasi penggunaan aplikasi MyPertamina, yang kadang ditemui kendala di lapangan.

"Ini perlu diantisipasi oleh Pertamina, jangan sampai penggunaan aplikasi tersebut malah menimbulkan antrian panjang, khususnya menjelang hari H dan sesudah hari H," ungkap Mulyanto.

Selain itu menurut Mulyanto yang juga perlu

mendapat perhatian Pertamina adalah terkait bisnis Pertashop. Selama ini dikeluhkan, para pengusaha Pertashop bahwa kondisinya antara hidup dan mati. Dalam rangka memperbanyak titik distribusi BBM, perlu dipikirkan

optimalisasi keberadaan Pertashop ini.

"Hal-hal penting dan temuan dari kunjungan ini, perlu didalam dan ditindaklanjuti oleh Komisi VII DPR RI bersama Pemerintah," tegas Mulyanto.



"Pertamina harus bisa mengantisipasi lonjakan permintaan BBM di berbagai daerah selama Ramadhan dan jelang hari raya Idul Fitri, terutama terkait kebutuhan BBM saat musim mudik. Mumpung masih ada waktu sebaiknya Pertamina dapat mempersiapkan kebutuhan tersebut dengan baik,"

**Dr. H. MULYANTO, M.Eng**

Anggota Komisi VII DPR RI



Pertanyakan Kebakaran Depo Plumpang  
pada Dirut PT Pertamina,

**Aleg PKS: Sudah Sembilan  
Kali, Seperti Hobi?**

Jakarta (17/03) --- Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi mempertanyakan kebakaran Depo Pertamina Plumpang dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirut PT Pertamina pada Kamis, (16/03/2023).

Nurhasan Zaidi mengungkapkan keprihatinannya atas seringnya kejadian kebakaran di kilang minyak PT Pertamina.

"Ini kalau sudah sembilan kali kan, udah kayak hobi. Cara penanganan musibah kilang minyak terbakar ini saya lihat tidak serius dan tidak komperhensif. Seperti lipstik aja. Ditangani, musibah lagi, ditangani musibah lagi. Tolong ditangani dengan serius. Karena satu nyawa itu mahal," tegas Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat IX ini.

Nurhasan Zaidi mengaku khawatir atas frekuensi kejadian kebakaran yang terjadi di kilang minyak PT Pertamina.

"Keprihatinan ini memperlihatkan bahwa anggota DPR RI memandang serius masalah keamanan di industri minyak dan gas, dan menekan-

kan pentingnya menjaga keselamatan para pekerja di sektor tersebut," ujarnya.

Nurhasan Zaidi menegaskan bahwa perusahaan seperti PT Pertamina harus tetap bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan keselamatan para pekerja dan masyarakat.

"Hal ini memperlihatkan bahwa DPR RI akan terus memantau dan mengevaluasi upaya perusahaan dalam mencegah terjadinya kebakaran di kilang minyak," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi VII DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat ini sebagai tindak lanjut atas laporan tentang kebakaran kilang minyak di Plumpang.

Selengkapnya kunjungi [fraksidpr.pks.id](https://fraksidpr.pks.id)

Perusahaan seperti PT Pertamina harus tetap bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan keselamatan para pekerja dan masyarakat.

**H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I**

Anggota Komisi VII DPR RI

# Kebakaran Kilang Pertamina, Aleg PKS minta Pemerintah Investigasi Seluruh Infrastruktur Pertamina

Bandung (03/04) — Anggota DPR RI Komisi VII Fraksi PKS, Diah Nurwitasari meminta Pemerintah untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap seluruh fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki Pertamina.

Ledakan kilang minyak pertama di Dumai yang terjadi pada hari Sabtu (01/04/2023) menjadi peristiwa kebakaran ke-7 sejak tahun 2021.

Tercatat bahwa kilang minyak milik Pertamina mengalami kebakaran pada 29 Maret 2021 di kilang Balongan, 6 Juni 2021 dan 13 Nov 2021 di kilang Cilacap. 4 Maret dan 15 Mei 2022 di kilang Balikpapan, dan paling terakhir yakni 3 Maret 2023 di depo Plumpang.

Kejadian yang telah terjadi berulang pada infrastruktur

Pertamina harus membuat Pertamina lebih fokus dalam melakukan evaluasi secara menyeluruh.

"Dengan berulangnya kejadian yang ada, maka investigasi dilakukan tidak hanya pada lokasi yang bermasalah, tapi juga evaluasi komprehensif di seluruh fasilitas dan infrastruktur yang dimiliki Pertamina. Jangan sampai terjadi lagi di fasilitas lain. Pemerintah harus lebih serius dalam mengawasi dari objek vital nasional.", tegas

Anggota Komisi VII tersebut.

Kejadian tersebut menjadi kabar yang begitu mengagetkan di tengah suasana bulan suci Ramadhan.

Dalam pernyataannya, Anggota DPR RI Fraksi PKS, Diah Nurwitasari mengungkapkan duka citanya atas kejadian kebakaran yang terjadi. Musibah tentu menjadi suatu hal yang tidak diharapkan semua pihak.

"Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap kejadian musibah ini adalah ujian bagi kita semua.", ujar Diah.

Legislator PKS Komisi VII tersebut mengingatkan semua pihak yang berwenang, dalam hal ini pemerintah dan Pertamina untuk melakukan evaluasi dan introspeksi atas kejadian tersebut.

"Harusnya musibah yang terjadi beberapa kali ini harus disadari oleh Pertamina untuk kemudian berkewajiban melakukan evaluasi dan introspeksi secara menyeluruh. Kita tidak bisa musibah serupa terjadi kembali", tegas politisi PKS tersebut.

Peristiwa kebakaran yang terjadi tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab. Diantaranya tentu faktor internal Pertamina, yang merupakan pengelola dari fasilitas tersebut. Baik itu dari faktor kelalaian kerja, ataupun kondisi infrastruktur utama maupun penunjang yang ada di kilang.

"Sejak awal kami menyoroti mengenai pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan bahkan pembaharuan secara teknologi untuk seluruh infrastruktur yang dimiliki Pertamina, yang mana merupakan objek vital negara.", ujar Politisi PKS asal Jawa Barat tersebut.

Kebakaran di Kilang Dumai membuat beberapa pekerja mengalami luka dan bangunan-bangunan milik warga di sekitar kawasan mengalami kerusakan.

"Pertamina juga harus bertanggung jawab atas korban-korban yang terdampak dari peristiwa kebakaran yang terjadi," tambah Diah.

Dalam pernyataan penutupnya, Diah memintah Pertamina untuk menyampaikan hasil dari investigasi tersebut kepada Komisi VII DPR RI maupun secara umum ke publik. Sehingga kondisi faktual maupun langkah-langkah yang harus dilakukan dapat diketahui bersama.



"Sejak awal kami menyoroti mengenai pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan bahkan pembaharuan secara teknologi untuk seluruh infrastruktur yang dimiliki Pertamina, yang mana merupakan objek vital negara.",

Dipl.Ing. Hj. **DAH**  
**NURWITASARI**, M. I. POL.  
Anggota Komisi VII DPR RI





## Aleg PKS Dorong Pemerintah Bertanggungjawab Tingkatkan Imbal Hasil dari Investasi Dana Haji

Jakarta (02/04) --- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mendorong pemerintah mengambil tanggung jawab terhadap pengembangan pola investasi yang dilakukan oleh BPKH.

Pasalnya, Bukhori menilai selama ini BPKH masih terjebak pada pola investasi yang konvensional.

“Meskipun pengelolaan dana haji telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun, tetapi pola pengelolaannya masih terbilang konservatif. Hal itu ditandai dengan mayoritas dana yang ditempatkan pada Surat Berharga hingga mencapai Rp112,96 Triliun serta imbal hasil (return) yang hanya mencapai rata-rata 3,5-7 persen per tahun,” ujar Bukhori dalam Rapat Dengar Pendapat dengan BPKH, Senin (28/3/2023).

Anggota DPR Dapil Jateng 1 ini menganggap pemerintah merupakan pihak yang paling diuntungkan dari dana jemaah haji yang terkumpul di BPKH.

“Mengingat sukuk terbesar bersumber dari dana haji dan, di sisi lain, pemerintah juga telah mengutus para wakilnya sebagai Anggota BPKH dan Ketua Dewas BPKH,” imbuhnya.

Oleh karena itu, lanjut Bukhori, sudah sepatutnya pemerintah mengambil tanggung jawab yaitu dengan cara memberikan modal bagi

BPKH agar bisa berinvestasi langsung dengan leluasa di berbagai instrumen yang kompetitif dan menjanjikan

namun tetap prudent.

“Modal tersebut misalnya bisa diberikan dalam bentuk pinjaman lunak (soft loan), sehingga ke depan BPKH tidak lagi berkuat dengan dalih terbatasnya kewenangan karena peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mindset investasi yang berkuat pada surat berharga,” pungkasnya.

Selama ini BPKH masih terjebak pada pola investasi yang konvensional. Meskipun pengelolaan dana haji telah berlangsung selama lebih dari 10 tahun, tetapi pola pengelolaannya masih terbilang konservatif. Hal itu ditandai dengan mayoritas dana yang ditempatkan pada Surat Berharga hingga mencapai Rp112,96 Triliun serta imbal hasil (return) yang hanya mencapai rata-rata 3,5-7 persen per tahun,”

**H. BUKHORI, Lc., M.A.**  
Anggota Komisi VIII DPR RI



Gambar: Antara

# Demi Keadilan, HNW Usulkan Cuti Bersama dan Libur Idul Fitri Dikoreksi dengan Dimajukan

Jakarta (24/03) --- Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR-RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mendesak agar SKB 3 Menteri Nomor 1066 Tahun 2022 tentang Hari Libur Bersama dan Cuti Bersama Tahun 2023, direvisi.

Hidayat menyalurkan cuti bersama Idul Fitri 1444 H yang ditetapkan yaitu mulai tanggal 21 April 2023, padahal ada bagian besar umat Islam yang penyelenggaraan Idul Fitri nya adalah pada tanggal 21 April.

Artinya dengan jadwal cuti bersama tersebut, mereka tidak punya waktu untuk mempersiapkan lebaran atau bahkan lakukan tradisi tahunan mudik ke kampung halaman.

"Seharusnya Pemerintah berlaku adil, dengan lebih peka memahami dan menyikapi potensi perbedaan penetapan jadwal 1 Syawal yang merupakan hal yang sering terjadi setiap tahunnya di Indonesia, sehingga keputusan cuti bersama mestinya dapat mengakomodasi mayoritas umat Islam di Indonesia yang banyak bekerja di birokrasi dan korporasi, yang sangat mungkin mengikuti pendapat yang berbeda soal penetapan 1 Syawal sebagai Hari Raya Idul Fithri yang menjadi tradisi diadakannya cuti nasional secara bersama," disampaikan Hidayat dalam keterangannya di

Jakarta.

SKB 3 Menteri Nomor 1066 Tahun 2022 itu ditandatangani oleh Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam SKB tersebut, cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah ditetapkan tanggal 21, 24, 25, dan 26 April.

Hidayat yang merupakan Anggota DPR-RI Komisi VIII yang diantaranya membidangi urusan agama menjelaskan, SKB tersebut tidak mengakomodatif terhadap bagian besar umat Islam yang akan menyelenggarakan Idul Fitri di tanggal 21 April.

"Pemerintah telah menetapkan libur Idul Fitri di

tanggal 22-23 April, namun ada juga sebagian ormas Islam yang sudah menetapkan Idul Fitri jatuh pada tanggal 21 April, sebelum tanggal 22-23 yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sementara Pemerintah tidak melarang malah meminta agar perbedaan penentuan hari Idul Fitri disikapi secara positif dalam semangat toleransi. Di saat yang sama aktivitas silaturahmi dan pulang kampung di Idul Fitri tahun ini mungkin akan meningkat lantaran badai Covid-19 sudah mereda, sehingga sudah selayaknya Pemerintah berlaku adil memfasilitasi masyarakat dengan memutuskan hari cuti dan libur bersama yang akomodatif untuk keperluan umat Islam yang hari lebarannya diperbolehkan berbeda," ujar politisi yang akrab disapa HNW.

Dirinya mencontohkan, salah satu ormas Islam terbesar di tanah air yakni Muhammadiyah, melalui Maklumat PP Muhammadiyah

« SEBELUMNYA

Hidayat menyalurkan cuti bersama Idul Fitri 1444 H yang ditetapkan yaitu mulai tanggal 21 April 2023, padahal ada bagian besar umat Islam yang penyelenggaraan Idul Fitri nya adalah pada tanggal 21 April.

## Demi Keadilan, HNW Usulkan Cuti Bersama dan Libur Idul Fitri Dikoreksi dengan Dimajukan

### « SEBELUMNYA

Nomor 1/M/MLM/1.0/2023 yang dikeluarkan pada 21 Januari 2023 telah menetapkan 1 Syawal 1444 H jatuh pada 21 April 2023.

Ketua MUI KH Abdullah Jaidi pada konferensi pers Kemenag 22 Maret 2023 juga telah menyampaikan kemungkinan terjadi perbedaan dalam penetapan 1 Syawal 1444 H yang perlu dicarikan solusinya oleh Pemerintah.

Adapun SKB 3 Menteri tentang cuti bersama Idul Fitri 1444 H ditetapkan jauh sebelumnya yaitu pada tanggal 11 Oktober 2022, sehingga waktu itu kemungkinan besar belum mempertimbangkan potensi perbedaan penetapan Idul Fitri di kalangan Umat Islam di Indonesia.

Oleh karena itu Hidayat mendesak agar SKB 3 Menteri direvisi dengan menghadirkan perwakilan-perwakilan Ormas Islam, serta mengedepankan prinsip Taqwa dengan bermusyawarah dalam semangat ukhuwah sehingga

bisa diambil keputusan baru soal cuti bersama dimajukan menjadi 20, 24, 25, dan 26 April, di mana libur lebarannya adalah tanggal 21 dan 22 April 2023.

“Keputusan baru yang mengedepankan keadilan dan maslahat bagi Umat seperti itu akan menjadi kebijakan yang adil dan empati untuk libur bersama keluarga di kampung halaman yang mengakomodasi Umat yang berbeda dalam penentuan 1 syawal. Hal itu juga diharapkan dapat menghilangkan kecemasan dari sebagian Umat yang merasa diberlakukan tidak adil karena tidak diakomodasinya sikap mereka, dan diharapkan akan dapat mewujudkan hakikat libur bersama keluarga yang dapat meningkatkan kohesivitas / ukhuwah di tengah masyarakat, juga meningkatnya



Seharusnya Pemerintah berlaku adil, dengan lebih peka memahami dan menyikapi potensi perbedaan penetapan jadwal 1 Syawal yang merupakan hal yang sering terjadi setiap tahunnya di Indonesia, sehingga keputusan cuti bersama mestinya dapat mengakomodasi mayoritas umat Islam di Indonesia yang banyak bekerja di birokrasi dan korporasi, yang sangat mungkin mengikuti pendapat yang berbeda soal penetapan 1 Syawal sebagai Hari Raya Idul Fithri yang menjadi tradisi diadakannya cuti nasional secara bersama,”

**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Anggota Komisi VIII DPR RI

# PROGRAM UNGGULAN

## FRAKSI PKS DPR RI



FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
*Kecatif Atrokrakif Substantif*

**Parlementaria** ( Diskusi Publik,  
PKS Legislative Corner, PKS Legislative Report,  
Ruang Aleg dan Internshipsks)



Diskusi, dialog, dan kolaborasi Fraksi PKS dengan pejabat publik, pakar, ahli, tokoh CSO, dan aktivis yang kompeten serta generasi muda untuk membahas, mengkaji, dan terlibat pada isu-isu publik dari sudut pandang parlemen.

# Aleg PKS: Pemerintah Perlu Jelaskan dan Buat Regulasi untuk THR Pegawai Honorer

Jakarta (31/03) — Pemerintah perlu membuat penjelasan dan regulasi tentang THR bagi pegawai honorer di lingkungan pemerintah. Hal ini menyusul pernyataan Menteri PAN-RB yang menyebut tidak ada THR bagi pegawai honorer merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang THR bagi ASN dan pensiunan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Dr Kurniasih Mufidayati menyebutkan, pemerintah memang tidak mengatur THR bagi tenaga honorer di pemerintahan baik instansi pusat dan daerah di PP No 15 tahun 2023, namun pemerintah bisa mencarikan dan menerbitkan beleid lain untuk mengakomodir THR honororer di lingkungan pemerintah.

Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan

Keluarga ini menyebutkan, menurut data Menteri PAN-RB, saat ini ada setidaknya 2,3 juta tenaga kerja honorer di lingkungan pemerintahan yang nasib THRnya tidak jelas menyusul statemen yang beredar.

Bagi Kurniasih, jika sampai tenaga kerja honorer tidak mendapatkan THR maka akan terjadi ketimpangan yang besar melihat peran vital honorer bagi jalannya administrasi

pemerintahan.

"Terutama honorer di bidang kesehatan yang menjadi concern Komisi IX DPR RI yang terbukti berjuang sama pentingnya saat menghadapi pandemi. Harus dibuatkan aturan dan tatacara untuk tenaga honorer mendapatkan THR tahun ini. Alasan ekonomi akibat Covid-19 seperti ini tidak lagi relevan digunakan sehingga seharusnya secara anggaran mampu diberikan," ucap Kurniasih lewat keterangannya, Jumat (31/03).

Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini mencontohkan Menteri Keuangan pernah mengeluarkan panduan anggaran THR bagi pegawai honorer pada satker pemerintah pusat dan daerah sehingga muncul surat Dirjen Perbendaharaan No. S-4452/PB/2018 tanggal 24 Mei 2018.

Sementara bagi pegawai honorer pemda bisa diberikan THR sesuai kemampuan keuangan daerah untuk memberikan THR.

"Dokter PTT, bidan PTT dan tenaga penyuluh KB kan termasuk dalam pegawai non-PNS yang kontribusinya sangat nyata dan jelas dalam penanggulangan pandemi dan pengurangan angka stunting yang menjadi fokus pemerintah. Saat itu bisa diatur secara eksplisit pemberian THR bagi mereka, maka saat ini seharusnya bisa dilakukan hal

yang sama," ungkapnya.

Sementara untuk sektor swasta, Kurniasih mengingatkan pegawai kontrak yang sudah bekerja selama minimal satu bulan berturut telah mendapatkan hak mendapatkan THR dengan porsi yang proporsional jika bekerja kurang dari 12 bulan dan satu bulan gaji jika bekerja di atas

12 bulan.

"Jadi meskipun baru bekerja sebulan lebih berturut-turut dan statusnya masih pekerja kontrak tetap mendapatkan THR secara proporsional. Ini yang harus dikawal dan teman-teman pekerja bisa melapor ke Disnaker jika terjadi persoalan tentang THR," ucap Kurniasih.



Jika sampai tenaga kerja honorer tidak mendapatkan THR maka akan terjadi ketimpangan yang besar melihat peran vital honorer bagi jalannya administrasi pemerintahan. Terutama honorer di bidang kesehatan yang menjadi concern Komisi IX DPR RI yang terbukti berjuang sama pentingnya saat menghadapi pandemi

**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI

# Netty Aher: Permenaker Nomor 5 tahun 2023 Bertentangan dengan Undang-Undang

Jakarta (30/03) — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani Aher menilai terbitnya Permenaker Nomor 5/2023 tentang Pengupahan yang membolehkan perusahaan ekspor memotong gaji karyawan hingga 25 persen, bertentangan dengan undang-undang.

"Pekerja atau buruh selalu saja menjadi objek yang terkena dampak ketika pemerintah membuat peraturan untuk menyikapi situasi ekonomi. Beberapa waktu lalu upah pekerja terkena penyesuaian karena Covid-19, sekarang ada kebijakan pemotongan karena alasan perubahan ekonomi global," kata Netty dalam keterangan tertulis yang diterima Parlemen, Rabu (29/3/2023).

Netty mengatakan, padahal dalam hubungan kerja, golongan pekerja seringkali berada dalam posisi paling rentan.

"Harusnya golongan ini

mendapat perhatian dan perlindungan pemerintah, bukan jadi objek penderita," kata Netty.

Dalam Permenaker Nomor 5/2023 disebutkan bahwa perusahaan berorientasi ekspor, bakal bisa memotong gaji karyawan hingga 25 persen sebagai tindak lanjut perubahan ekonomi global dengan ditandai turunnya permintaan ekspor dari AS dan Eropa.

"Kenapa fokus aturan yang dibuat pemerintah selalu pada pengurangan ongkos produksi, dalam hal ini upah pekerja? Jika Permenaker bisa membatasi upah pekerja 75 persen,

dapatkah pemerintah membuat aturan yang membatasi keuntungan perusahaan?" katanya.

Pada sisi lain, menurut Netty, Permenaker Nomor 5/2023 jelas melanggar Pasal 90 jo Pasal 185 UU Nomor 13/2003 dan Pasal 88E jo Pasal 185 UU Cipta Kerja.

"Permenaker ini melanggar undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah ditandatangani Presiden, di mana kebijakan Presiden hanya ada upah minimum. Bukankah ini artinya Menaker membuat peraturan yang isinya bertentangan dengan peraturan di atasnya?" tanya Netty.

"Dalam kondisi ekonomi seperti sekarang ini, kebijakan tersebut tentu berdampak buruk karena merugikan pekerja dan mencederai rasa keadilan bagi pekerja," sambung Politisi Fraksi PKS ini.

Selain itu, lanjut Netty, terbitnya Permenaker No 5/2023 mengisyaratkan seolah pemerintah lepas tangan.

"Pemerintah seolah lepas tangan begitu saja. Padahal ada banyak cara yang bisa dilakukan. Kalau mau mengurangi biaya produksi perusahaan, pemerintah dapat mengurangi bea masuk bahan impor untuk produksi dan memberikan insentif pajak," ungkapnya.

"Jangan ciptakan situasi

yang dapat ditafsiri seolah pemerintah sengaja membuat perusahaan dan pekerja 'berselisih'," kata Netty.

Menurutnya, ketentuan pengupahan 75 persen baru bisa diterapkan jika adanya kesepakatan antara perusahaan dan pekerja menjadi pasal karet yang berpotensi jadi bahan perselisihan. "Kalau pekerja



"Pemerintah seolah lepas tangan begitu saja. Padahal ada banyak cara yang bisa dilakukan. Kalau mau mengurangi biaya produksi perusahaan, pemerintah dapat mengurangi bea masuk bahan impor untuk produksi dan memberikan insentif pajak,

**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

# Tingkat Sertifikasi Guru Rendah, Aleg PKS: Ada yang Salah dengan Soalnya!

Jakarta (14/03) — Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Fakhri, menerima aspirasi dari Forum Komunikasi Eks Guru Pelatih PLPG. Aspirasi yang disampaikan berupa permohonan untuk mendampingi dalam memperjuangkan perbaikan program PLPG.

Aspirasi ini disampaikan dalam kegiatan Aspirasi di Ruang Meeting Fraksi PKS, Gedung Nusantara 1 Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (14/03).

Membuka sesi tanggapan, Fikri menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan Bapak dan Ibu terhadap Fraksi PKS.

"Saya berterima kasih kepada bapak dan Ibu karena telah berjuang melalui fraksi PKS. Saya mengapresiasi bapak dan Ibu karena telah mempercayai fraksi PKS untuk berjuang," ujar Anggota DPR RI Fraksi PKS ini.

Fikri memaparkan

bagaimana sistem Uji Kompetensi Guru di masa lalu. Kurang lebih permasalahannya sama, berkaitan dengan kemampuan bagi yang masih muda kontras dengan yang sudah berumur.

"Sebelumnya, pada masa kemendikbud yang lalu sudah ada UKG (Uji Kompetensi Guru) yang memenuhi passing grade mereka yang berumur 40 tahun ke bawah. Betul bahwa yang lebih muda bisa jawab soal lebih mudah, tetapi belum tentu pembinaannya pada murid sudah baik," papar Wakil Ketua Komisi X ini.

Untuk mempercepat

advokasi yang dibebankan kepada Komisi X, Fikri mendorong agar yang melapor juga turut membantu mengirimkan data-data di lapangan, termasuk segala permasalahan secara detail.

"Berikan kami masukan untuk uji kompetensi guru ini, bantu sertakan data-data yang bapak dan Ibu punya, sampaikan kepada kami keresahan-keresahan dan kendala-kendala lainnya," dorong Fikri.

Masalahnya sudah jelas, menurut Fikri. Kesempatannya sudah ada, tetapi masih ada masalah melihat tingkat kelulusan yang rendah.

"Meskipun SPLTG masih dapat ikut PPLG untuk mendapatkan sertifikasi, tetapi masih ada masalah dibaliknyanya. Jika kelulusan hanya 29%, artinya ada yang salah dengan soalnya."

Fikri menyampaikan kesediaannya untuk membantu, tetapi tidak hanya berhenti disitu Fikri juga meminta agar semua ikut mengawal terus, tidak hanya berhenti sampai diskusi di ruang rapat ini.

"Kami bantu, jika ada hal lain yang dibutuhkan maka sampaikan kepada kami. Kawal terus aspirasi ini. Kurangnya apa, sampaikan kepada kami. Kami akan tindak lanjut. Akan kami sampaikan pada Rapat Dengar Pendapat agar lebih luasa menyampaikannya," pungkas Fikri.



"Kami bantu, jika ada hal lain yang dibutuhkan maka sampaikan kepada kami. Kawal terus aspirasi ini. Kurangnya apa, sampaikan kepada kami. Kami akan tindak lanjut. Akan kami sampaikan pada Rapat Dengar Pendapat agar lebih luasa menyampaikannya,"

**Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM**

Wakil Ketua Komisi X DPR RI



Terkait Rektor Tersangka Korupsi,

**Aleg PKS: Perlu Pengawasan Keterbukaan di Dunia Kampus!**

## Jakarta (17/03) --- Anggota Komisi X DPR RI FPKS, Fahmy Alaydroes memaparkan inti persoalan dan solusi dari kondisi korupsi yang terjadi di perguruan tinggi.

Hal ini disampaikan dalam program PKS Legislative Corner dengan tema 'Lagi.. Rektor Jadi Tersangka Korupsi', pada Jum'at siang (14/03).

Anggota Legislatif Fraksi PKS ini memaparkan persoalan-persoalan yang terjadi di perguruan tinggi. Persoalan ini membutuhkan dana yang besar untuk dapat teratasi.

"Inti dari persoalan kita adalah tersalurnya anak-anak bangsa kita untuk bisa menikmati perguruan tinggi yang bermutu. Kedua, kita juga berharap pendidikan tinggi memiliki kemampuan yang cukup untuk memanage perguruan tinggi yang bermutu tinggi. Ini adalah dua persoalan yang perlu kita padankan yang membutuhkan dana yang tinggi," papar Anggota Legislatif Fraksi PKS ini.

Jalur mandiri, menurut Fahmy, tidaklah salah karena ketidakmampuan pemerintah untuk dapat menyelesaikan persoalan yang membutuhkan dana yang besar.

"Jika negara belum mampu untuk memberikan dana yang cukup untuk pendidikan yang tinggi. Jalur mandiri tidak bisa disalahkan.

Jalur mandiri ini pendekatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mengajak orang tua yang memiliki ekonomi cukup dan berlebih untuk bersama-sama memajukan pendidikan tinggi," ujar Fahmy.

Terlepas dari jalur mandiri, peran pemerintah juga masih perlu hadir dalam merekrut mahasiswa yang memiliki ekonomi kurang, tetapi memiliki kemampuan yang memadai.

"Disaat yang bersamaan, pendidikan tinggi juga perlu untuk bisa terbuka merekrut mereka yang memiliki kemampuan yang memadai. Disinilah peran pemerintah untuk memastikan pemerataan mutu perguruan tinggi," tegas Fahmy.

Solusi yang diutarakan oleh Fahmy, salah satunya

terkait keterbukaan yang perlu dikawal. Pengawasan penting untuk menutup celah terjadinya KKN di dunia kampus.

"Dalam konteks jangka pendek, jalur mandiri yang sudah berlangsung harus dikawal. Dikawal dengan transparansi, terbuka, tidak boleh ditutup-tutupi keperluan untuk mengelola perguruan tinggi tersebut. Celah KKN akan berkurang jika hal ini dilakukan. Saya berharap kampus-kampus membudayakan demokrasi, transparansi, akuntabel dan pengawasan juga dibantu oleh media di dalam kampus," ujar Fahmy.

Fahmy menutup dengan harapan untuk dunia kampus kedepannya, agar penuh dengan perbaikan demi kepercayaan masyarakat atas dunia kampus.

Selengkapnya kunjungi [fraksidpr.pks.id](https://fraksidpr.pks.id)

“Saya berharap dunia kampus ini menjadi dunia yang berdiri di depan, menjadi panggung utama untuk perbaikan keadilan bangsa kita. Dimulai dari mahasiswa, berdiri bersama berbagai elemen masyarakat lain.

**Dr. H. FAHMY  
ALAYDROES, MM, M.Ed**

Anggota Komisi X DPR RI



Inkonsistensi FIFA dalam  
World Cup U-20,

## Aleg PKS: Bersatu dan Konsisten menolak Israel!

Jakarta (29/03) — Anggota Komisi X FPKS, Mustafa Kamal mendukung penolakan yang telah dilakukan juga oleh beberapa Kepala Daerah. Hal ini disampaikan pada Rapat Kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, di Ruang Rapat Komisi X, Gd. Nusantara 1, Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (28/03)

Anggota Komisi X ini menyatakan, terlepas kesediaan dari kepala daerah untuk menjadi lokasi diadakannya FIFA World Cup U-20. Kita juga perlu untuk mendengarkan aspirasi dari pihak-pihak yang menyatakan penolakan.

"Ada beberapa kepala daerah, empat gubernur dan dua walikota, yang telah menandatangani untuk menjadi tuan rumah. Akan tetapi, penting untuk

mempertimbangkan aspirasi dari gubernur bali. Perlu disebutkan juga gubernur Jawa Tengah juga menyatakan sikap tegasnya atas penolakan israel," ujar Anggota Komisi X ini.

Mustafa menegaskan, bangsa Indonesia masih dan harus setia pada konstitusi, salah satunya untuk memastikan kemerdekaan adalah hak segala bangsa.

"Bangsa kita saat ini, masih setia pada konstitusi

kita. bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa," ujar Mustafa.

Konsisten dengan konstitusi, Mustafa menyatakan perlu untuk menolak Israel. Apalagi mengetahui inkonsistensi dari FIFA yang tidak tegas pada Israel berkaca pada ketegasannya terhadap Rusia.

"Politik luar negeri kita konsisten terhadap Israel. Terdapat standar ganda dari FIFA, Rusia sudah ditolak karena melakukan aneksasi terhadap Ukraina. Apalagi israel yang bahkan tidak mengakui kenegaraan palestina sangat diskriminatif. Artinya sikap politik Israel telah menghina negara-negara dan menghina kedaulatan kita," Ujar Mustafa.

Menurut Mustafa, hal ini dapat menjadi ancaman karena bisa saja serangan semacam ini terjadi di Indonesia dan dunia malah menganggap itu hal yang biasa.

"Bisa menjadi pembenaran untuk menjadi perilaku yang sama untuk negara manapun termasuk menjadi ancaman bagi negara kita sendiri," ungkap Mustafa.

Mustafa mengajak agar semua bisa bersatu sikap, untuk tegas menolak delegasi Israel.

"Marilah kita bersatu, bersikap tegas menolak tegas delegasi israel dalam World Cup U-20 ini," tegas Mustafa.

Mustafa berharap agar

pemerintah memperhatikan aspirasi ini, dan tegas dalam melakukan diplomasi.

"Upaya diplomasi dari pemerintah semoga bisa

berada dalam bingkai itu. Semoga pak Jokowi bisa memastikan agar kita semua selalu konsisten," pungkas Mustafa.



"Politik luar negeri kita konsisten terhadap Israel. Terdapat standar ganda dari FIFA, Rusia sudah ditolak karena melakukan aneksasi terhadap Ukraina. Apalagi israel yang bahkan tidak mengakui kenegaraan palestina sangat diskriminatif. Artinya sikap politik Israel telah menghina negara-negara dan menghina kedaulatan kita

**H. MUSTAFA KAMAL, S.S.**

Anggota Komisi X DPR RI

# Legislator Minta Kemendikbudristek Perhatikan Implementasi Merdeka Belajar di Daerah 3T

Jakarta (30/03) — Anggota Komisi X DPR RI Sakinah Alfujri meminta Kemendikbudristek untuk turut memperhatikan peningkatan literasi membaca melalui program episode 23 Merdeka Belajar di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), khususnya di provinsi Sulawesi Tengah.

Pasalnya, berdasarkan informasi yang ia terima, provinsi Sulawesi Tengah berada pada urutan 6 (enam) terendah dalam tingkat literasi membaca di Indonesia.

“Kami berada di daerah 3T. Ada 12 Kabupaten dalam satu provinsi. Peringkat (literasi membaca) kami ada pada enam dari bawah. Ini sungguh memukul dan menampar muka kami semua di Sulawesi Tengah. Kami ingin tahu daerah-

daerah mana yang diturunkan buku-buku itu di kabupaten supaya sehingga kami bisa pantau,” ungkap Sakinah dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Politisi Fraksi PKS itu menilai program episode 23 Merdeka Belajar di daerah 3T akan mempercepat

peningkatan minat baca sekaligus literasi membaca. Antusiasme ini, sebutnya, bisa dilihat bagaimana setiap sekolah baik PAUD maupun SD menantikan kehadiran buku-buku tersebut, terutama oleh insan guru dan murid di Provinsi Sulawesi Tengah.

Oleh sebab itu, Sakinah ingin mengawal dan memantau distribusi buku-buku tersebut hingga sampai pada setiap sekolah yang membutuhkan. Terakhir, dirinya berharap Kemendikbudristek tidak menciptakan kesenjangan dalam penentuan kuota distribusi buku-buku tersebut di Indonesia. Ia tidak ingin jika daerah yang memiliki tingkat literasi rendah memperoleh buku-buku dengan jumlah yang sedikit.

“Kami ingin tahu pergerakan distribusi sudah sampai mana di Provinsi Sulawesi Tengah itu karena saya bertanggung jawab terhadap masyarakat yang ada di sana. Saya juga berharap tidak terjadi ketimpangan (pembagian buku tersebut) di Indonesia ini. Jangan ada pendidikan yang lebih tinggi (mendapatkan buku lebih banyak) dibandingkan dengan pendidikan rendah,” pungkas legislator Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah itu.

Sebagai informasi, Kemendikbudristek meluncurkan program penguatan literasi melalui kebijakan Merdeka

Belajar Episode Ke-23: Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia. Program tersebut berfokus pada pengiriman buku bacaan bermutu untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) yang disertai dengan pelatihan bagi guru.

Dengan distribusi buku yang diiringi oleh adanya

pelatihan ini diharapkan para guru-guru dan pustakawan kedua bisa memahami kegunaan dan kebermanfaatannya buku yang diterima. Program ini dirancang berdasarkan hasil Asesmen Nasional (AN) tahun 2021 yang mana saat itu Indonesia sedang mengalami darurat literasi.



“Kami ingin tahu pergerakan distribusi sudah sampai mana di Provinsi Sulawesi Tengah itu karena saya bertanggung jawab terhadap masyarakat yang ada di sana. Saya juga berharap tidak terjadi ketimpangan (pembagian buku tersebut) di Indonesia ini.

**Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag**

Anggota Komisi X DPR RI



# Aleg PKS: Pemerintah Perlu Tinjau Ulang Larangan Bukber, Berpengaruh pada Bangkitnya Ekonomi Pasca Pandemi

Jakarta (25/03) — Menanggapi kebijakan pemerintah yang melarang Kementerian/ Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah melakukan buka puasa bersama,

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati memandang bahwa surat Sekretaris Kabinet (Seskab) yang ditujukan pemerintahan, tidak secara tegas menyebutkan hanya berlaku di internal instansi Pemerintahan, karenanya surat tersebut berpotensi dipertuas maknanya sebagai larangan buka puasa bersama di masyarakat.

Anis yang merupakan Anggota Komisi XI DPR RI menegaskan bahwa seharusnya moment Ramadhan sangat signifikan berdampak pada ekonomi, seperti kegiatan buka bersama, akan berdampak positif bagi kenaikan pendapatan masyarakat.

"Mulai dari bisnis makanan, minuman, sembako, jasa transportasi, ritel dan

warung tradisional semua menunggu momen Ramadhan ini," ungkap Anis.

Bahkan, imbuhnya, untuk menyambut bulan Ramadhan, banyak kalangan pedagang yang sudah stok barang dalam jumlah banyak sebagai antisipasi kenaikan permintaan saat ramadhan.

"Maka seyogyanya Ramadhan tahun ini menjadi momentum konsumsi rumah tangga secara musiman tumbuh dengan signifikan. Dampak positif berupa kenaikan pendapatan masyarakat ini dikhawatirkan akan hilang dengan adanya kebijakan larangan Buka Puasa Bersama," jelas Anis.

Anis yang juga sebagai Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI melihat bahwa kebijakan ini menjadi

kontraproduktif dan tidak arif bagi kalangan umat muslim yang banyak menunggu Ramadhan sebagai salah satu ajang silaturahmi dan kebersamaan khususnya saat berbuka puasa.

"Kalau memang alasannya karena penanganan Covid-19 saat ini dalam transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian, tentu ini tidak arif dan sangat tidak tepat di tengah kegiatan konser musik yang mengundang ribuan massa saja sudah diperbolehkan," ujarnya.

Politisi senior PKS dari Daerah Pemilihan (DAPIL) DKI Jakarta 1 Jakarta Timur ini meminta pemerintah berlaku arif dan tidak menerapkan kebijakan yang kontra produktif dan tidak tepat. Momentum berbuka puasa bersama di bulan Ramadhan janganlah hanya dinilai dan dimaknai hanya kumpul-kumpul makan bersama saja.

"Tetapi lebih pada adanya nilai-nilai spiritual bagi umat



Seyogyanya Ramadhan tahun ini menjadi momentum konsumsi rumah tangga secara musiman tumbuh dengan signifikan. Dampak positif berupa kenaikan pendapatan masyarakat ini dikhawatirkan akan hilang dengan adanya kebijakan larangan Buka Puasa Bersama,

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI

muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa selama sebulan di bulan Ramadhan," jelas Anis.

Anis sangat berharap pemerintah dapat meninjau kembali larangan ini dan mengambil sisi positif dari 'berbuka puasa bersama'

sebagai salah satu cara untuk menjalin silaturahmi dan sinergi antar umat muslim, khususnya di kalangan Kementerian/ Lembaga Negara baik pusat maupun daerah, yang akan memberikan pengaruh kepada bangkitnya ekonomi Indonesia paska pandemi.



**Walk Out dari Paripurna,  
Fraksi PKS Komitmen Tolak  
Perpu Cipta Kerja Disahkan!**

Jakarta (21/03) --- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI melakukan walkout dalam sidang paripurna DPR RI yang beragendakan salah satunya pengesahan pengesahan RUU Perpu Ciptaker menjadi Undang-Undang, Selasa, (21/03).

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf yang mewakili Fraksi PKS menegaskan pandangan Fraksi terkait dengan Perpu nomor 2 tahun 2022.

"Sesuai dengan perintah konstitusi dimana perpu harus dibahas pada persidangan berikut yaitu pada persidangan yang terdekat sebagaimana diatur dalam undang-undang P3 maupun tatib. Dan yang kedua menghargai terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang Ciptaker, yang memerintahkan untuk memperbaiki proses di dalam penyusunan undang-undang serta melibatkan seluruh stakeholder dan memperluas pendengaran dan pandangan dari seluruh

masyarakat," ungkap Anggota Badan Legislasi ini.

Dan, imbuh Bukhori, konsisten dengan pandangan Fraksi PKS yang telah memberikan catatan-catatan kritis yang telah disampaikan dalam pembahasan Ciptaker di Panja dan Badan Legislasi DPR.

"Maka, dengan segala hormat, kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak Perpu Nomor 2 tahun 2022 dan menyatakan walkout untuk agenda penetapan terhadap Perpu nomor 2 tahun 2022 meskipun kami akan kembali untuk agenda-agenda yang lain. Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh ." tutup Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah 1 ini.

Sesuai dengan perintah konstitusi dimana perpu harus dibahas pada persidangan berikut yaitu pada persidangan yang terdekat sebagaimana diatur dalam undang-undang P3 maupun tatib.

**H. BUKHORI, Lc., M.A.**  
Anggota Komisi VIII DPR RI

# RUU PPRT Sah sebagai Inisiatif DPR RI, Aleg PKS: Perlindungan Harus Menyeluruh!

Jakarta (21/03) — Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai Rancangan Undang-Undang inisiatif DPR RI.

Persetujuan ini disampaikan dalam Sidang Paripurna di Ruang Badan Legislasi, Gd. Nusantara 1 Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada Senin (21/03).

Dalam Sidang Paripurna, membahas RUU PPRT, RUU yang sangat penting bagi Pekerja Rumah Tangga, Bukhori menyatakan persetujuannya mewakili Fraksi PKS terhadap keputusan RUU PPRT sebagai RUU inisiatif DPR RI.

"Kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menyetujui

Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga untuk ditetapkan dalam rapat paripurna hari ini menjadi Rancangan Undang-Undang inisiatif DPR RI," tegas Anggota Badan Legislasi Fraksi PKS ini.

Apresiasi diberikan atas pengambilan keputusan ini dari Bukhori karena setelah sekian lama keputusan RUU inisiatif DPR RI akhirnya diputuskan.

"Kami mengapresiasi atas pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada Rapat

Paripurna hari ini. Akhirnya, setelah penyusunan, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU oleh Badan Legislasi sejak 1 Juli 2020, dapat diputuskan menjadi RUU Inisiatif," ujar Bukhori.

Menambahkan pendapat Fraksi, Bukhori menekankan perlindungan harus menyeluruh sesuai dengan UUD 1945.

"Harapan kami, perlindungan terhadap PRT harus menyeluruh dengan mencakup pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di mata hukum, perlindungan yang adil dan layak, perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda dibawah kekuasaannya, hak mendapatkan rasa aman, bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," pungkas Bukhori.

Bukhori menambahkan dua pasal yang perlu ditambahkan, yaitu terkait jam kerja yang manusiawi dan pelatihan yang diselenggarakan baik dari pemerintah maupun penyalur PRT.

"Harus ada hak bagi pekerja pada waktu jam kerja

yang manusiawi dan UU PPRT harus mendorong adanya pendidikan dan pelatihan bagi calon PRT diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, bersama dengan penyalur PRT," tambah Bukhori.

Bukhori menegaskan kembali, perlindungan terutama dari tindakan perdagangan manusia harus dilindungi oleh

pemerintah.

"Perlindungan yang utama, harus terhindar dari tindakan perdagangan manusia. Tidak boleh ada aturan pemungutan biaya bagi PRT, menahan dokumen, dan menyalurkan PRT pada badan usaha yang bukan pemberi kerja perseorangan," tegas Bukhori.



"Kami mengapresiasi atas pengambilan keputusan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada Rapat Paripurna hari ini. Akhirnya, setelah penyusunan, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU oleh Badan Legislasi sejak 1 Juli 2020, dapat diputuskan menjadi RUU Inisiatif,"

**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Badan Legislasi DPR RI

*Live*  
*Interactive*

Bersama  
Anggota  
Legislatif PKS



BERSAMA ARI PUTRA UTAMA



**Saksikan**  
**Setiap Jum'at**  
pk. 13.30 s.d 14.30 WIB





## Ketua FPKS DPR RI: Layani Rakyat Tanpa Pandang Latar Belakang



Jakarta (18/03) — Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini memberikan motivasi pada kegiatan Bimbingan Teknik (BIMTEK) DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah Sumbagsel dengan tema Meningkatkan Peran dan Kontribusi Anggota DPRD Dalam Memperjuangkan Aspirasi Rakyat yang diselenggarakan di hotel Ciputra Jakarta, Jumat (17/03/2023).

Dalam arahnya Jazuli mengajak seluruh Anggota legislatif dari pusat hingga daerah untuk meningkatkan moralitas agama, moralitas kebangsaan dan melayani rakyat tanpa memandang latar belakang.

Aleg asal Dapil Banten ini juga menambahkan agar Anggota Legislatif dari PKS untuk bergaul dengan siapa saja dan melayani rakyat tanpa harus memilih milih.

"Kita Melayani siapa saja rakyat kita yang ada di daerah pemilihan kita, kita melayani rakyat tidak pernah mengenal warna kulitnya apa, kita melayani rakyat tidak mengenal agamanya apa, ormas nya apa. Seluruh masyarakat Indonesia, seluruh anggota dewan wajib melayani mereka semuanya secara serius memperjuangkan kepentingan rakyat," ujar Anggota Komisi I DPR RI

Jazuli juga mengajak untuk

terus menggemakan perjuangan untuk rakyat sampai rakyat merasakan, meyakini dan mengakui bahwa anggota-anggota dewan PKS selalu memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Walaupun kita harus sendirian di Fraksi DPRD,

DPR Provinsi dan mungkin di DPR Pusat selama kita membela kepentingan rakyat kita tidak perlu minder kita tidak perlu merasa sendiri karena ada rakyat bersama kita," tegasnya

Jazuli mengajak kepada para Anggota Dewan Sumbagsel untuk aktif memposting seluruh perjuangannya ke sosial media. Bukan untuk pamer, pamrih dan ria melainkan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik

"Publik memilih kita, apa yang kita lakukan untuk publik harus diketahui publik," tegasnya mengakhiri.

"Kita Melayani siapa saja rakyat kita yang ada di daerah pemilihan kita, kita melayani rakyat tidak pernah mengenal warna kulitnya apa, kita melayani rakyat tidak mengenal agamanya apa, ormas nya apa. Seluruh masyarakat Indonesia, seluruh anggota dewan wajib melayani mereka semuanya secara serius memperjuangkan kepentingan rakyat,

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI



## Sakinah Berharap Kemenparekraf Terus Perhatikan Festival Raudhah SIS Aljufri

Jakarta (31/03) -- Dalam rapat kerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sakinah Aljufri mengapresiasi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno.

"Apresiasi kami kepada bapak menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia yang luar biasa telah menyentuh kawasan religi SIS Aljufri," ungkap cucu Guru Tua, Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri beberapa waktu silam.

Festival Raudhah yang merupakan rangkaian Haul Sayid Idrus bin Salim Aljufri (SIS Aljufri) selalu digelar di Kompleks Alkhairaat, kawasan religi SIS Aljufri di jalan SIS Aljufri Kecamatan Palu Barat, Kota Palu.

Peringatan haul guru tua untuk mengenang jasa, pengorbanan, dedikasi untuk agama, bangsa dan Negara yang telah ditorehkan oleh Guru Tua, Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri selama berdakwah melalui Pendidikan. Lembaga Pendidikan Alkhairaat yang dulu didirikannya saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah berjumlah lebih dari 1.600 lembaga pendidikan.

Pada gelaran Festival Raudhah tahun 2022 silam mampu menghadirkan 50 ribu masyarakat dari berbagai provinsi dan mancanegara yang

hadir.

"Selain suksesnya acara, kegiatan Festival Raudhah juga mampu meningkatkan perputaran ekonomi kreatif di sana," legislator PKS daerah pemilihan Sulawesi Tengah ini.

Ucapan terima kasih dan laporan pertanggungjawaban

kami sampaikan kepada pak Menteri dan jajarannya.

"Dan di waktu yang sama, saya bermohon kepada pak menteri untuk terus memperhatikan Festival Raudhah SIS Aljufri, kawan religi dan jangan putus hanya di tahun 2022 saja," pungkas anggota Komisi X DPR RI.

Sakinah kemudian menyerahkan laporan dokumentasi kegiatan Festival Raudhah SIS Aljufri tahun 2022 kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahudin Uno.

”

Peringatan haul guru tua untuk mengenang jasa, pengorbanan, dedikasi untuk agama, bangsa dan Negara yang telah ditorehkan oleh Guru Tua, Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri selama berdakwah melalui Pendidikan. Lembaga Pendidikan Alkhairaat yang dulu didirikannya saat ini telah berkembang dengan pesat dan telah berjumlah lebih dari 1.600 lembaga pendidikan.

**Hj. SAKINAH ALJUFRI, S.Ag**

Anggota Komisi X DPR RI





## Aleg PKS: Semen Indonesia Harus Mampu Menjawab Isu Keberlanjutan dan Lingkungan

Jakarta (25/03) --- Industri semen saat ini semakin vital karena sudah menjadi kebutuhan pokok, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan properti. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan hunian maupun infrastruktur, kebutuhan semen pun terus meningkat.

Namun industri semen harus mampu menjawab dua isu penting ke depan, yaitu keberlanjutan dan isu lingkungan. Selain itu, Industri semen juga harus mampu bersaing di pasar global agar tidak terjadi kelebihan pasokan di dalam negeri.

Hal itu disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak saat menyampaikan sosialisasi BUMN Sektor Konstruksi bertepatan 'Membangun Indonesia Berkelanjutan yang Aman dan Ramah Lingkungan' di Jember, Jawa Timur, Jumat (24/03/2023).

Sejumlah isu yang harus mampu dijawab oleh industri semen antara lain adalah jejak emisi yang dihasilkan dari proses produksi semen. Baik emisi dari penggunaan bahan bakar saat pengolahan maupun emisi debu yang terbuang ke udara.

Selain itu Industri semen juga dituntut untuk mampu

mengelola lahan tambang dimana mereka mengambil bahan baku semen, terutama dari sisi ekologis seperti keberlanjutan air tanah di kawasan tambang maupun penghijauan kembali lahan bekas tambang.

Amin mengapresiasi sejumlah inovasi dan teknologi yang dikembangkan PT Semen Indonesia (SIG) yang dulu bernama Semen Gresik dalam menjawab isu keberlanjutan dan lingkungan. SIG berinovasi memproduksi semen ramah lingkungan rendah jejak emisi

guna mendukung target mencapai net zero emission (NZE) pada 2060 mendatang.

Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV itu meminta SIG terus berinovasi menjawab tantangan ke depan yang semakin kompleks. Berbagai inisiatif yang dilakukan SIG, antara lain penggunaan energi baru terbarukan (EBT) seperti panel surya dan energi biomassa dari limbah industri kayu dan perkebunan.

Amin meminta SIG meningkatkan dan memperluas sejumlah inisiatif keberlanjutan seperti pengurangan konsumsi air tanah, pengelolaan limbah dan sampah untuk diubah menjadi energi alternatif, dan pengurangan emisi konvensional dan CO2. SIG juga harus memperluas program konservasi sumber daya alam dengan melibatkan masyarakat sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Program-program

BERIKUTNYA >>>

Pembangunan infrastruktur, tak hanya soal konstruksi. Namun bagaimana sebuah konstruksi dapat bertahan dan bernilai tinggi dalam jangka Panjang. Selain itu, produk semen harus bersifat ramah lingkungan untuk mengurangi dampak pemanasan global.



## Aleg PKS: Semen Indonesia Harus Mampu Menjawab Isu Keberlanjutan dan Lingkungan

### « SEBELUMNYA

semacam itu, bukan hanya bisa menjawab isu lingkungan dan keberlanjutan, namun juga menjadi syarat penting agar Semen Indonesia bisa masuk ke pasar Eropa, Amerika, dan China," kata Amin.

Lebih lanjut Amin mengatakan, pasar ekspor menjadi penting mengingat penyerapan semen di dalam negeri baru 50% dari total kapasitas produksi terpasang. Saat ini total produksi nasional mencapai 120 juta ton per tahun, sedangkan konsumsi semen dalam negeri baru mencapai 60 juta ton per tahun. Dari total 120 juta ton tersebut, tahun 2022 lalu Semen Indonesia memproduksi 56,2 juta ton atau hampir separuhnya.

Khusus untuk daerah Jember dan sekitarnya, Amin menyoroti munculnya produk semen milik asing merk 'Singa Merah'. Produsen semen Singa Merah sangat massif memasarkan produknya ke masyarakat. Dan masyarakat

banyak yang beralih mengkonsumsi Singa Merah karena harganya relatif lebih murah.

"Ini menjadi tantangan bagi industri semen nasional ditengah kelebihan pasokan semen hingga 100% dari serapan pasar domestik saat ini," ungkapnya.

Semen Indonesia juga merupakan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk industri semen. SIG adalah holding company yang memayungi enam anak usaha produsen semen yaitu, Semen Padang, Semen Gresik, Semen Tonasa, Solusi Bangun Indonesia, Semen Baturaja dan Thang Long Cement Company di Vietnam.

Pembangunan infrastruktur, tak hanya soal konstruksi. Namun bagaimana sebuah konstruksi dapat bertahan dan bernilai tinggi dalam jangka Panjang. Selain itu, produk semen harus bersifat ramah lingkungan untuk mengurangi dampak pemanasan global.

Karena itu, Amin pun

mengapresiasi sejumlah inovasi produk ramah lingkungan yang dihasilkan PT SIG. Diantaranya produk beton yang ramah lingkungan seperti ThruCrete (beton berpori), LocoCrete (beton rendah emisi karbon), dan DekoCrete (beton dekoratif) dengan menggunakan semen ramah lingkungan pada revitalisasi trotoar dan area perkerasan lainnya.

SIG juga memiliki produk semen curah non-OPC (ordinary Portland cement) dan semen Hidraulis yang ramah lingkungan karena rendah emisi karbon.

"Saya berharap BUMN Semen mampu terus memproduksi produk berkualitas tinggi agar konstruksi dan properti yang dibangun negara dan rakyat bertahan lama atau awet. Ini bagian dari upaya penghematan nasional", pungkas Amin.



mengatakan, pasar ekspor menjadi penting mengingat penyerapan semen di dalam negeri baru 50% dari total kapasitas produksi terpasang. Saat ini total produksi nasional mencapai 120 juta ton per tahun, sedangkan konsumsi semen dalam negeri baru mencapai 60 juta ton per tahun. Dari total 120 juta ton tersebut, tahun 2022 lalu Semen Indonesia memproduksi 56,2 juta ton atau hampir separuhnya.

**AMIN AK, M.M.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI  
Dapil Jawa Timur IV



H. Rofik Hananto, S.E.

## Lepas Da'i Muda Berdakwah di Daerah



Purbalingga (24/03) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Rofik Hananto bersama Yayasan Erhanesia Tunas Kebajikan (ETK) melepas 6 Da'i Muda, dimana Da'i tersebut selama bulan Ramadhan ditugaskan untuk berdakwah di daerahnya.

Program tersebut sudah disiapkan tiga bulan sebelumnya, dimana yayasan ETK bersilaturahmi dengan masjid-masjid yang ada di Purbalingga.

Selain pelepasan Da'i Muda Ramadhan, acara yang diadakan di Ballroom Gedung Halal Mart Purbalingga pada Selasa (21/03) tersebut juga digelar pelatihan manajemen masjid yang diikuti oleh lebih dari 60 peserta yang merupakan DKM/Takmir masjid/mushola se-Purbalingga.

Adapun pelatihan tersebut dibawakan oleh Sarmin DKM Masjid Fatimatuz Zahra (MAFAZA) dan Afiq Yunan Aliyudin, Dewan Pengawas Yayasan ETK.

Direktur Eksekutif Yayasan ETK Andi Pranowo menjelaskan proses seleksi Da'i Muda Ramadhan ini, dimulai dari peserta yang lolos tahap seleksi administrasi diundang untuk mengikuti proses uji kompetensi, dimaksudkan sebagai pemetaan awal untuk melihat sejauh mana pemahaman dan kompetensi para da'i yang nantinya akan diterjunkan untuk berkegiatan

di masyarakat selama bulan Ramadhan.

"Ada tiga aspek utama yang menjadi poin penilaian pada uji kompetensi tersebut yakni tilawatil Al Qur'an, Hafalan Al Qur'an serta kemampuan public speaking dalam bertausiah, para peserta yang didominasi lulusan pesantren tersebut secara umum sudah memiliki kompetensi sebagai da'i, bahkan salah satu peserta yang berasal dari Bumiayu adalah seorang hafiz yang telah mengkhathamkan hafalan nya 30 juz," terangnya.

Rofik sebagai Pembina Yayasan ETK mengatakan pembentukan yayasan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial atau CSR atas entitas bisnis yang dimiliki oleh Rofik Hananto.

"(Yayasan) Erhanesia ini

yayasan yang kami bentuk karena kami punya entitas di beberapa bidang, sehingga ini bisa menjadi sebagai sarana untuk bidang lingkungan dan Corporate Social Responsibility," ujarnya

Anggota DPR RI Fraksi PKS tersebut menyebutkan program-program yang telah diberikan sebelumnya, seperti pada tahun lalu memberikan tunjangan kepada 1000 guru TPQ di Purbalingga.

"Tahun ini Inshaallah akan kami lanjutkan, dan kami berharap semua mesjid yg terlibat dan majlis taqlim yg terlibat nanti bisa kita akses untuk mendapatkan program ini," imbuh anggota DPR RI Dapil Jateng VII tersebut.

Selain itu, Rofik juga akan mengadakan buka puasa bersama setiap hari di kediamannya selama bulan Ramadhan, yang akan bekerjasama dengan yayasan ETK.

Rofik berharap hubungan yang telah dibangun dengan penerima bantuan dapat memperluas jaringan kebermfaatannya dari yayasan ETK ini.

"Kami berharap hubungan dan support dari bapak-bapak

Anggota DPR RI Fraksi PKS tersebut menyebutkan program-program yang telah diberikan sebelumnya, seperti pada tahun lalu memberikan tunjangan kepada 1000 guru TPQ di Purbalingga.

## Tebar Kebaikan di Bulan Ramadhan, Rofik Lepas Da'i Muda Berdakwah di Daerah

### « SEBELUMNYA

sekalian, semoga bisa tumbuh berkembang dan bisa memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, karena salah satunya (alasan) kami membangun yayasan ini agar apa yang sudah kita kerjakan ini dapat dirasakan juga oleh masyarakat.” tutur anggota DPR RI Dapil Jateng VII tersebut.

Sarmin sebagai pemateri pelatihan manajemen masjid mengatakan pentingnya mengelola masjid karena masjid menjadi pusat kegiatan umat, sehingga pengurus harus dapat mengelola masjid dengan baik dan benar. Selain itu, masjid juga harus memiliki payung

hukum yang jelas seperti yayasan agar memiliki legalitas.

Sarmin menyebutkan beberapa permasalahan masjid di Indonesia, seperti legalitas tanah wakaf, kepengurusan masjid yang tertutup sehingga hanya dikelola oleh 1-2 orang saja, jamaah pasif karena pengurus tidak menerima kritik maupun saran, dan keberpihakan pengurus pada satu golongan saja.

Menurut Sarmin, pengelolaan masjid tidak boleh bersifat tertutup dan harus memiliki inisiatif serta kreativitas terhadap perubahan sosial sekitar. Contohnya yaitu ketika sekolah tutup karena pandemi, masjid dapat menjadi tempat pembelajaran baru bagi anak-anak.

“Tahun ini Insyaallah akan kami lanjutkan, dan kami berharap semua mesjid yg terlibat dan majlis taqlim yg terlibat nanti bisa kita akses untuk mendapatkan program ini

**H. ROFIK HANANTO, S.E**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah VII





## 16 Tokoh Sumbar Raih Penghargaan Padang TV, Nevi Apresiasi dan Siap Kolaborasi

Padang (13/03) --- Sebanyak 16 tokoh Sumbar meraih penghargaan The Best Leader of The Year dalam berbagai kategori pada malam anugerah ulang tahun ke-16 Padang TV, di PCC Ballroom, Hotel Truntum Padang, Jumat (03/03/2023) malam.

“Luar biasa, hebat. Padang TV keren. Memberikan para tokoh publik di Sumbar apresiasi karena telah berbuat terbaik bagi masyarakat, daerah dan usahanya,” ungkap anggota DPR RI Nevi Zuairina, di sela menghadiri acara itu.

Malam itu, puluhan tokoh publik yang memiliki pengaruh besar di masyarakatnya hadir. Para bupati dan wali kota serta Wakil Gubernur Audy Joinaldy, Wakomut Bank Mandiri Andrinof Chaniago, Rektor Universitas Yarsi Fasli Jalal, mantan Ketua DPD RI Irman Gusman, dan lainnya.

Nevi mengaku senang karena para tokoh termasuk kepala daerah yang hadir kompak dan akrab malam itu. Hal ini perlu dijaga agar bisa bersama-sama berkolaborasi membangun Sumbar.

“Padang TV luar biasa. Acara dihadiri 16 tokoh, para pemimpin kota dan kabupaten yang kompak dan akra. Ini potensi luar biasa bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumbar,” ujar Nevi.

Anggota DPR Dapil II Sumbar tersebut diberikan kehormatan menyerahkan tropi penghargaan kepada Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo yang menerima Best Leader of The Year kategori Pengembangan Kebudayaan.

“Selamat Pak Safaruddin Dt. Bandaro Rajo. Kerja keras bapak memajukan kebudayaan di Limapuluh Kota dianugerah award oleh Padang TV. Dan juga kepada bapak kepala daerah lain, ada Pak Benny Utama

(Bupati Pasaman), Pak Andri Warman (Bupati Agam), Pak Genius Umar (Wako Parliaman) dan Suhatri Bur (Bupati Padangpariaman), Wako Padangpanjang Fadly Amean saya ucapkan selamat semuanya. Pas sekali anugerah Padang TV diberikan kepada sosok pemimpin terbaik di daerahnya,” kata politisi perempuan PKS ini.

Nevi sebagai wakil rakyat menegaskan kesiapannya berkolaborasi dan sinergi dengan kepala dan wakil kepala daerah di Sumbar.

“Siap berkolaborasi dengan pak bupati dan wali kota dalam membangun Sumbar dengan program-program yang bertujuan menjejahterakan masyarakat dan kemajuan pembangunan Sumbar,” katanya.

“Padang TV luar biasa. Acara dihadiri 16 tokoh, para pemimpin kota dan kabupaten yang kompak dan akra. Ini potensi luar biasa bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sumbar,”

**Hj. NEVI ZUAIRINA**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI  
Dapil Sumatera Barat II



# SELAMAT KEPADA FAJAR/RIAN Juara All England 2023



Final ganda putra All England 2023 mempertemukan dua pasangan dari Indonesia, **Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto** vs **Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan**



Menang dua set langsung

**21-17** **21-14**

## Fakta-Fakta Menarik :

- Rekor fantastis bagi Hendra Setiawan yang sukses melaju ke final ganda putra di turnamen internasional tiap tahunnya sejak 2002
- Hendra/Ahsan mampu melangkah ke final All England selama dua tahun berturut-turut (2022 dan 2023) meskipun di final kalah dari lawannya yang keduanya dari Indonesia
- Gelar pertama bagi Fajar/Rian selama mengikuti All England
- All England adalah gelar kedua bagi Fajar/Rian di tahun 2023. Setelah juara di Malaysia Open 2023





## Berada di Dapil, Habib Aboe Berbagi Ramadhan Sampai Ke Pelosok

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (25/03) –

- Guna menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial di tengah bulan Ramadhan, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar meminta agar kader PKS berbagi ke semua lapisan masyarakat.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan (25/03) — Guna menumbuhkan rasa kesetiakawanan sosial di tengah bulan Ramadhan, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar meminta agar kader PKS berbagi ke semua lapisan masyarakat.

Hal ini disampaikan di tengah sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang diselenggarakan di Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan (25/3).

"Berbagi saat Ramadhan itu penting sekali, bisa menguatkan ukhuwah islamiyah, yang paling penting buat bangsa dan negara adalah akan mengokohkan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini adalah salah satu pilar penting dalam berbangsa dan bernegara". Ungkap Anggota MPR RI dari Dapil Kalimantan 1 tersebut.

Lebih lanjut Aboe Bakar minta agar spirit berbagi ini bisa dilakukan sampai ke buncu-buncu (pelosok-pelosok).

"Semua warga harus kita sapa, berbagi kita lakukan sampai ke buncu buncu. Tidak ada yang boleh terlewatkan

oleh kita, apalagi berbagi ini kita lakukan di tengah ramadhan," terang Anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Habib Aboe Bakar juga mengingatkan agar digunakan produk lokal untuk komoditi yang akan di bagi ke masyarakat.

"Usahakan kalau berbagi di Kandangan ini juga

menggunakan produk hasil petani disini. Sehingga misalkan saja, untuk pembagian sembako, gunakan beras hasil petani Kandangan sendiri. Sehingga hasil padi petani disini akan bisa terserap dengan baik. Kita berharap, hal ini akan bisa menggerakkan ekonomi setempat", jelas Bendahara Fraksi PKS tersebut.

"Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh PKS Tabalong kemarin yang berbagi 250 kg ikan segar. Ini adalah bentuk berbagi ke masyarakat, yang sekaligus menggerakkan ekonomi para peternak ikan setempat", tukasnya memberikan contoh.

"Usahakan kalau berbagi di Kandangan ini juga menggunakan produk hasil petani disini. Sehingga misalkan saja, untuk pembagian sembako, gunakan beras hasil petani Kandangan sendiri. Sehingga hasil padi petani disini akan bisa terserap dengan baik. Kita berharap, hal ini akan bisa menggerakkan ekonomi setempat",

**HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Kalimantan Selatan I



Dr. Hermanto, S.E., M.M.

## Adakan Bimtek dan Serahkan Bantuan Sapi



Kabupaten Kepulauan Mentawai (25/03) - -- Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Kepulauan Mentawai memfasilitasi peternak dan masyarakat dengan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Hermanto juga menyerahkan sapi bantuan pemerintah kepada peternak setempat.

"Beternak harus dengan cinta. Kita beri ternak dengan pakan dan perawatan terbaik. Nanti hewan ternak itu juga akan memberikan hasil yang terbaik untuk pemilikinya", papar Hermanto dalam sambutannya pada kegiatan bimtek di Aula Bundo Guest House, Tuapejat, Sipora, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Jumat (24/03/2023).

Dalam kehidupan, menurut Hermanto, harus saling memberi. Setelah memberi maka akan menerima. "Memberi dulu maka nanti akan menerima", ucap legislator dari FPKS DPR RI ini.

Hal tersebut, lanjutnya, berlaku juga dalam beternak. Kita beri ternak dengan perlakuan terbaik terhadap pakannya, kebersihan badannya, kebersihan kandangnya, perawatan kesehatannya.

"Itulah cinta. Nanti, ternak itu juga akan memberi kita hasil

terbaik. Harga terbaik", papar Hermanto.

"Setelah bimtek ini diharapkan semua peserta bisa memberikan cinta, perlakuan terbaik kepada hewan peliharaan masing-masing", pungkas legislator Dapil Sumbar I ini.

Disamping Hermanto, hadir memberikan sambutan pada kegiatan ini Kepala BPTU-HPT Padang Mengatas Dani Kusworo, Sekda Kabupaten Kepulauan Mentawai Rinaldi, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Mentawai Hatisama Hura, serta 2 tokoh masyarakat Ahmad Siddiq dan Basarudin Pulungan.

Tampil sebagai narasumber kegiatan ini: Deni

Mahesarani (Sekretaris Rumah Petani dan Nelayan Nusantara Sumatera Barat), Satria Asmal (motivator SPEKTA Indonesia), Wahidin Beruh (Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Sumatera Barat) dan Yuliana Elsanida (Staf Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab Kepulauan Mentawai).

Setelah membuka kegiatan Bimtek, Hermanto berkunjung ke kelompok tani Aleita, Desa Matobe, Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Di lokasi itu Hermanto menyerahkan sapi kepada kelompok tersebut.

Kegiatan Bimtek Kab Kepulauan Mentawai ini merupakan kegiatan terakhir dari rangkaian Bimtek Manajemen Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sumatera Barat.

Kegiatan bimtek sebelumnya sudah dilaksanakan di Sijunjung (Aula Wisma Keluarga 16 Maret 2023), Dharmasraya (Aula Hotel Omega 17 Maret 2023), Tanah Datar (Aula Hotel Emersia 18 Maret 2023) dan Padang Panjang (Aula Hotel Pangeran 19 Maret 2023)

"Setelah bimtek ini diharapkan semua peserta bisa memberikan cinta, perlakuan terbaik kepada hewan peliharaan masing-masing",

**Dr. HERMANTO, S.E., M.M**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Sumatera Barat I





## Nur Azizah Tamhid Beri Pencerahan Politik bagi Kader Posyandu dan Penggerak PKK di Sukmajaya



### Depok (15/03) — Anggota DPR Fraksi PKS Nur Azizah Tamhid menggelar kegiatan reses di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Selasa (28/2/2023).

Bertempat di Jalan Rasamala No.216, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, kegiatan reses ini dihadiri oleh sekira 50 pegiat sosial dari 20 RT/RW.

"Hari ini saya bertemu ibu-ibu penggerak PKK dan kader posyandu di Sukmajaya," kata Nur Azizah, Selasa (28/2/2023).

Nur Azizah menjelaskan para pegiat sosial ini merupakan garda terdepan untuk mencetak generasi muda berkualitas.

"Mereka ini yang berperan dalam membentuk generasi muda yang cerdas dan berkualitas di masa depan," ucapnya.

Dalam reses ini, Nur Azizah memberikan pencerahan politik bagi para ibu-ibu pegiat sosial ini.

"Saya memberikan ceramah tentang politik Islam agar mereka tidak salah dalam memilih pemimpin," paparnya.

Salah satu isu yang diangkat oleh Nur Azizah dalam reses ini adalah soal maraknya fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di Kota Depok.

"Tahun 2022 lalu ada 199 orang mada LSL (Lelaki Seks

Lelaki), Tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi 327. Ini kenaikan yang luar biasa. Ada apa ini?" tutur Nur Azizah.

Menurut dia, maraknya LGBT berpotensi meningkatkan jumlah penderita HIV/AIDS di Kota Depok.

"Saya minta ibu-ibu penggerak PKK dan kader Posyandu agar mengawasi pergaulan anaknya agar tidak melenceng dari ajaran agama Islam," papar Nur Azizah.

Dia menambahkan merajalelanya pergaulan bebas

di kalangan anak muda juga disebabkan karena hukum yang jauh dari nilai-nilai agama.

"DPR sudah mengesahkan UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU ini berubah karena bisa melegalkan perzinahan. Hanya PKS dan Partai Demokrat yang menolak pengesahan UU ini tahun lalu," tandas Nur Azizah.

Usai reses di Sukmajaya, Nur Azizah melanjutkan kegiatan dengan konsolidasi kader PKS di Pancoran Mas.

Nur Azizah bertemu dengan kader PKS dari 3 kelurahan di Kecamatan Pancoran Mas yaitu Mampang, Depok dan Pancoran Mas.

Merajalelanya pergaulan bebas di kalangan anak muda juga disebabkan karena hukum yang jauh dari nilai-nilai agama. DPR sudah mengesahkan UU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UU ini berbahaya karena bisa melegalkan perzinahan. Hanya PKS dan Partai Demokrat yang menolak pengesahan UU ini tahun lalu,"

**Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VI



## Bertemu Konstituen di Dapil, Syaikhu Ajak Masyarakat Menjaga NKRI

Kabupaten Bekasi (20/03) --- Anggota DPR sekaligus MPR RI dari Fraksi PKS Ahmad Syaikhu mengajak masyarakat Kabupaten Bekasi untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu disampaikan Syaikhu dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Babelan, Kabupaten Bekasi, Ahad, (05/03/2023).

Menurut Syaikhu, menjaga NKRI sangat penting karena ini adalah bentuk final dari negara dan hasil kesepakatan Para Pendiri Bangsa.

"Kita wajib menjaga NKRI. Karena ini adalah hasil kesepakatan Para Pendiri Bangsa dan bentuk final negara kita," ujar Syaikhu.

Presiden PKS itu menambahkan, NKRI hasil konsensus bersama yang diwarisi oleh Para Pendiri

Bangsa. Karena itu, sudah seharusnya sebagai generasi penerus, kita menjaga dan merawat NKRI.

Sekitar 100 orang menghadiri acara ini. Mereka adalah utusan masyarakat dari beberapa kecamatan di Kabupaten Bekasi.

Hadir pula Tenaga Ahli Anggota DPR RI Erwyn Kurniawan dan Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi Budi MM.

Menjaga NKRI sangat penting karena ini adalah bentuk final dari negara dan hasil kesepakatan Para Pendiri Bangsa. Kita wajib menjaga NKRI. Karena ini adalah hasil kesepakatan Para Pendiri Bangsa dan bentuk final negara kita,

**H. AHMAD SYAIKHU**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VII



## Akhir masa Reses, Bukhori Serahkan Bantuan untuk Warga Kota Semarang



Semarang (13/03) — Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf menyerahkan bantuan asistensi rehabilitasi sosial (ATENSI) senilai Rp228 juta.

Menggendong Sentra Terpadu Kartini Kementerian Sosial selaku mitra Komisi VIII DPR RI, bantuan tersebut disalurkan kepada 460 penerima manfaat di Kota Semarang yang tergolong kelompok rentan yang terdiri dari lansia, anak, serta penyandang disabilitas.

“Selain untuk pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan diserahkan dengan tujuan pemberdayaan secara sosial-ekonomi. Hal tersebut tercermin dari jenis bantuan yang diberikan seperti bantuan kewirausahaan berupa perlengkapan alat usaha seperti blender serta alat penunjang penyandang disabilitas seperti tongkat adaptif,” ucap Bukhori saat penyerahan bantuan ATENSI di kantor kelurahan Sambiroto, Kota Semarang (12/03/2023).

Anggota DPR Dapil Jawa Tengah 1 ini menambahkan, DPR mendukung program pemerintah mengentaskan kemiskinan melalui pendekatan pemberdayaan. Dukungan tersebut tidak hanya tercermin dari pelaksanaan fungsi anggaran DPR, tetapi juga lewat fungsi pengawasan DPR.

“Komisi VIII DPR mengawal anggaran itu mulai dari sejak diketok (disahkan) hingga sampai ke tangan masyarakat. Selain untuk pengawasan, kehadiran kami di sini sebagai

wujud dukungan moril kepada Kemensos dan pelayanan kepada konstituen kami di Kota Semarang,” tambahnya.

Sementara, Singgih Wahyu Purmono, perwakilan dari Sentra Terpadu Kartini Kemensos, menerangkan para penerima manfaat adalah warga yang telah masuk dalam daftar sistem calon penerima manfaat yang telah melalui asesmen oleh Kementerian Sosial serta advokasi oleh Komisi VIII DPR.

“Kami mengapresiasi dukungan dari Komisi VIII DPR sehingga banyak masyarakat mendapatkan manfaat dari kerjasama yang baik antara Komisi VIII DPR dengan Kementerian Sosial,” pungkasnya.

“Selain untuk pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan diserahkan dengan tujuan pemberdayaan secara sosial-ekonomi. Hal tersebut tercermin dari jenis bantuan yang diberikan seperti bantuan kewirausahaan berupa perlengkapan alat usaha seperti blender serta alat penunjang penyandang disabilitas seperti tongkat adaptif,”

**KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Tengah I



## Aleg PKS Minta Menteri LHK Jangan Remehkan Dampak Kerusakan Lingkungan di NTB

Jakarta (29/03) — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menindaklanjuti kunjungan reses DPR RI ke Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 17-21 Februari 2023

dimana salah satu temuannya adalah lamanya proses audit lingkungan hidup untuk kegiatan berisiko tinggi (deep sea tailing) atas PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2021 lalu.

Menurut Johan, publik berhak mendapat penjelasan terkait hasil audit tersebut karena konstitusi kita telah menegaskan bahwa mendapatkan lingkungan hidup yang sehat merupakan hak bagi setiap warga negara.

"Saya minta Bu Menteri LHK (lingkungan hidup dan kehutanan) jangan meremehkan ancaman kerusakan lingkungan hidup akibat kegiatan deep sea tailing yang telah terindikasi melanggar aturan karena keluar dari garis batas izin tapak

tailing, temuan dari kunker reses DPR ini harus segera ditindaklanjuti dengan tegas oleh KLHK demi pencegahan kerusakan lingkungan di Provinsi NTB," ucap Johan saat melakukan Rapat Kerja dengan Menteri LHK beserta jajarannya di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta Selasa, (28/03/2023).

Johan yang merupakan legislator yang berasal dari dapil NTB 1 meminta agar KLHK jika diperlukan dapat membuat semacam putusan sela agar menghentikan sementara pembuangan tailing sebelum keluarnya rekomendasi resmi terkait audit lingkungan hidup dari KLHK.

"Harus ada evaluasi yang lengkap terkait sistem pengelolaan risiko tinggi lingkungan dalam mencegah dan mengendalikan dampak

lingkungan yang telah dilakukan pada fasilitas deep sea tailing placement yang telah dilakukan PT AMNT terutama dari sisi sistem manajemen risiko, peralatan dan tindakan untuk pencegahan dan mitigasi serta kompetensi Sumberdaya Manusia" urai Johan.

Politisi PKS ini menguraikan bahwa dari hasil kunjungan reses dapat disimpulkan terdapat indikasi ketidakpatuhan fasilitas deep sea tailing placement terhadap peraturan perundang-undangan dan perizinan.

"Karena berdasarkan modelling yang disampaikan, ada indikasi bahwa sebaran tailing diduga telah melebihi batas izin," ujar Johan.

Selanjutnya Johan menyayangkan bahwa auditor belum berhasil melakukan verifikasi terkait sebaran tailing yang terindikasi keluar dari garis batas izin tapak tailing, dengan alasan karena terkendala pada para peral

atan yang tersedia tidak reliable terhadap kebutuhan pengamatan dan kesulitan pengambilan sampling di laut dengan kedalaman di atas 1000 m.

Johan menandakan agar Menteri LHK jangan terlihat tidak berdaya akibat kurangnya alat dan sarana yang tepat, harus ada eksekusi dari Tim KLHK dan para auditor untuk melakukan pengamatan secara langsung terhadap pipa bawah laut dan harus dapat mengkonfirmasi sebaran tailing eksisting dengan peralatan yang memiliki kemampuan daya pandang dan arus laut yang sangat kuat.

Legislator yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini berharap KLHK segera menindaklanjuti temuan dari para auditor bahwa adanya ketidaksesuaian terkait pipa tailing laut dan ditemukan korosi pada pipa bagian bawah yang berada di jalur pipa tailing timur di area transisi pipa darat dan pipa laut.

"KLH

K mesti

"KLHK mesti memperhatikan bahwa berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Provinsi NTB tahun 2012 oleh Pusat Vulkanologi, bahwa wilayah ini masuk dalam kate-gori Kawasan Rawan Gempa Menengah yang memungkinkan terjadinya risiko patah pada pipa tailing,

**H. JOHAN  
ROSIHAN, S.T**  
Anggota Komisi IV DPR RI





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



*Salurkan*  
**ASPIRASI ANDA**  
**DI HARI ASPIRASI**  
**FRAKSI PKS DPR RI**

Kegiatan Aspirasi dilaksanakan  
setiap Selasa dan Jum'at.

Ajuan Aspirasi

Isi via website form : <https://fraksi.pks.id/form-aspirasi-2/>



Kunjungan Forum Kepala Desa,

## Aleg PKS: Fokus Persiapan agar Program Berjalan!



Jakarta (21/03) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Suryadi Jaya Purnama, menerima aspirasi dari Forum Kepala Desa Kecamatan Lenek Lombok Timur Nusa Tenggara Barat (NTB) di Ruang Meeting Fraksi PKS, Gedung Nusantara 1 Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta pada Senin (21/03).

Aspirasi yang disampaikan terkait program-program dan kepariwisataan di desa-desa Kecamatan Lenek Lombok Timur NTB.

Membuka kegiatan aspirasi ini, Suryadi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Forum Kepala Desa ini.

"Terima kasih kepada bapak-bapak kepala desa yang hadir dan menyuarakan untuk kemajuan program di desa masing-masing," ujar Anggota DPR RI Fraksi PKS ini.

Menjawab aspirasi dari Forum Kepala Desa, Suryadi menyatakan agar program-program dari DPR RI berjalan, persyaratan di Desa harus sudah memenuhi standar.

Untuk itu, Suryadi akan membantu persiapan tersebut.

"Kami akan siapkan persyaratan-persyaratan teknis. Program-program yang kami usulkan akan kami siapkan. Agar program tidak tertunda, kita harus lebih siap lagi. Ketika menyusun program di DPR,

program yang di anggarakan belum tentu dijalankan jika belum siap di tempat program tersebut akan dijalankan," pungkas Suryadi.

Beberapa permasalahan lain, salah satunya permasalahan sampah sudah ada programnya. Akan tetapi, Suryadi menekankan agar kepala desa dapat segera mengurus terlebih dahulu persyaratan dan persiapannya.

"Kendala sampah, harus

sudah ada lahannya dimana agar program-program dapat dijalankan. Kalau bisa selesai segera tahun ini. Siapkan sesegera mungkin agar semua selesai dilaksanakan," ujar Suryadi.

Salah satu poin penting diungkapkan oleh Suryadi terkait dengan penataan kawasan wisata dan industri.

"Penataan kawasan-kawasan wisata dan industri harus segera dilakukan, wisata sudah paketan dari kuliner dan kamar penginapan. Semua lahan perlu untuk dipersiapkan, dari lahan kosong menjadi kamar-kamar hotel," ungkap Suryadi.

"Penataan kawasan-kawasan wisata dan industri harus segera dilakukan, wisata sudah paketan dari kuliner dan kamar penginapan. Semua lahan perlu untuk dipersiapkan, dari lahan kosong menjadi kamar-kamar hotel,"

**H. SURYADI JAYA  
PURNAMA, S.T**

Anggota Komisi V DPR RI



## Terima Kunjungan PPNI, Hermanto: Fraksi PKS Tolak UU Omnibus Law Kesehatan!

Jakarta (28/03) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Hermanto menerima kunjungan aspirasi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) bertempat di Ruang Rapat Fraksi PKS, Senayan, Jakarta (28/03).

"RUU Omnibus Law Kesehatan ini menjadi usul inisiatif yang telah ditetapkan oleh Badan Legislatif, yang kemudian akan dikirim kepada pemerintah. Setelah itu ada pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR," ujarnya.

Fraksi PKS DPR RI mengkritik tajam terkait dengan UU Omnibus Law Kesehatan ini dan menyatakan penolakannya secara resmi dalam rapat dewan Badan Legislatif.

Usulan diperbolehkannya tenaga kesehatan asing di dalam UU Omnibus Law Kesehatan ini dapat mengancam secara serius para tenaga kesehatan dalam negeri, khususnya Perawat. Sehingga,

hal ini langsung ditolak secara tegas oleh Fraksi PKS DPR RI.

"Bapak dan Ibu perwakilan PPNI, kami dari Fraksi PKS melakukan perlawanan secara keras terhadap upaya-upaya pihak yang menginginkan usulan diperbolehkannya tenaga kesehatan asing untuk dapat bekerja di Indonesia. Hal ini sangat berbahaya bagi tenaga kesehatan lokal, karena lapangan kerja bagi tenaga kesehatan lokal dapat hilang," tegasnya.

Diharapkan kepada PPNI untuk membuat draft usulan terkait dengan apa saja aturan-aturan yang seharusnya dimasukkan dan dihapuskan dalam UU Omnibus Law Kesehatan.

Kami dari Fraksi PKS melakukan perlawanan secara keras terhadap upaya-upaya pihak yang menginginkan usulan diperbolehkannya tenaga kesehatan asing untuk dapat bekerja di Indonesia. Hal ini sangat berbahaya bagi tenaga kesehatan lokal, karena lapangan kerja bagi tenaga kesehatan lokal dapat hilang,"

**Dr. HERMANTO, S.E., M.M**  
Anggota Badan Legislatif DPR RI



## Terima Barisan Muda Al-Irtihadiyah Jakarta, Mardani Dukung Pembuatan Film Anies Baswedan

Jakarta (28/03) --- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera menerima kunjungan aspirasi dari DPW Barisan Muda Al-Irtihadiyah Jakarta di Ruang Meeting Fraksi PKS DPR RI, Senayan, Jakarta (28/03).

"Saya sangat mengapresiasi terkait dengan ide pembuatan film biografi dari Bapak Anies Baswedan tersebut. Ide yang sangat menarik dan kreatif," Ujar Mardani.

DPW Barisan Muda Al-Irtihadiyah Jakarta dalam kesempatan aspirasi kali ini meminta dukungan daripada Fraksi PKS DPR RI untuk mewujudkan ide pembuatan film biografi dari seorang tokoh di negeri ini, yaitu Bapak Anies Baswedan.

"Tentunya kami dari Fraksi PKS DPR RI mendukung penuh segala bentuk karya kreatif yang dibuat oleh para generasi muda Indonesia," Tegas Mardani.

Ide pembuatan film biografi Anies Baswedan sudah direncanakan jauh-jauh hari oleh Barisan Muda Al-Irtihadiyah Jakarta

Tujuan pembuatan film tersebut adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja, kepribadian, intelektual, dan kepedulian dari Bapak Anies Baswedan kepada negeri ini.

Sehingga diharapkan ke depannya, para generasi muda dapat lebih mengenal sosok Anies Baswedan sebagai seorang tokoh yang memiliki sumbangshi yang besar bagi Indonesia.

“Saya sangat mengapresiasi terkait dengan ide pembuatan film biografi dari Bapak Anies Baswedan tersebut. Ide yang sangat menarik dan kreatif,”

**Dr. H. MARDANI, M.Eng**  
Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I





## Peringati Mosi Integral Natsir, HNW: Hari NKRI perlu Menjadi Hari Nasional!

Jakarta (03/04) --- Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid menjadi keynote speaker dalam acara memperingati Hari Mosi Integral Natsir yang diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI yang mengambil tema 'Semangat Generasi Menjaga (Mosi Integral) NKRI'.

Anggota Komisi VIII ini mengapresiasi FPKS, karena menjadi pelopor peringatan hari NKRI ini.

"Fraksi PKS merupakan bagian dari yang terus menggaungkan hari peringatan nasional, seperti hari ini maupun hari kemerdekaan. Yang masih belum diikuti oleh fraksi-fraksi lain di DPR RI," ujar pria yang akrab disapa HNW ini.

Dalam kegiatan ini, HNW mengusulkan untuk diadakannya hari nasional NKRI, sebagai pengingat sejarah dan belajar dari masa lalu.

"Saya mengusulkan agar tanggal 3 April ini menjadi hari nasional NKRI. Agar menjadi acuan untuk terus mengingatkan terhadap NKRI ini. Terutama untuk anak muda jaman sekarang yang banyak tidak mengenal sejarahnya sendiri," ungkap HNW.

HNW memaparkan, banyak yang menerima NKRI harga mati, tetapi tidak paham akan sejarah perubahan NKRI

menjadi RIS hingga menjadi NKRI lagi.

"Sekarang ini kan teriakannya adalah NKRI harga mati, tetapi banyak anak-anak muda tidak memperhatikan waktu itu oleh Belanda mengubah Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Tanpa ada mosi integral dari Natsir pada tahun 1950, tidak akan ada NKRI lagi," papar HNW.

Menurut HNW, banyak teladan yang bisa kita pelajari dari masa lalu terutama pada

perjuangan mosi integral Natsir.

"Keteladanan dari banyaknya partai di masa lalu, dapat kita tarik persatuannya. Mosi integral merupakan contoh nyata. Latar belakang partai politik yang berbeda, banyaknya partai dapat menciptakan bhinneka tunggal ika," ungkap HNW.

HNW menjelaskan manfaat lainnya dari peringatan hari Nasional NKRI ini.

"Hadirnya hari NKRI sangat bermanfaat bagi anak muda, agar dapat mengambil pelajaran. Keberagaman bukan berarti pembelahan, tetapi juga untuk menciptakan kolaborasi kerja sama dalam persatuan. Manfaatnya juga diperlukan untuk melindungi kita dari ancaman yang masih ada di depan mata, seperti separatisme, ideologi yang dilarang Pancasila, dan ancaman lainnya," pungkas HNW.

Hadirnya hari NKRI sangat bermanfaat bagi anak muda, agar dapat mengambil pelajaran. Keberagaman bukan berarti pembelahan, tetapi juga untuk menciptakan kolaborasi kerja sama dalam persatuan.

**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Wakil Ketua MPR RI



## Peneliti Politik BRIN: Pentingnya Mosi Integral Natsir bagi Bangsa Indonesia!

Jakarta (03/04) --- Peneliti Utama Pusat Riset Politik BRIN, Lili Romli menyatakan bahwa tanpa Mosi Integral Muhammad Natsir, Indonesia sampai hari ini mungkin masih menjadi negara federal.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Memperingati Hari Mosi Integral Natsir yang diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI secara daring, Senin, (03/04).

"Muhammad Natsir adalah seorang pemimpin dan pemikir politik Indonesia terkemuka yang memberikan kontribusi signifikan bagi perjuangan bangsa untuk kemerdekaan dan pembangunan pasca kemerdekaan," ujarnya.

Lili menambahkan, Natsir adalah salah satu tokoh terkemuka dalam gerakan nasionalis Indonesia. Ia adalah anggota delegasi Indonesia yang ikut serta dalam perundingan dengan pemerintah Belanda pada akhir tahun 1940-an, yang berujung pada pengakuan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949.

"Mosi Integral Muhammad Natsir memiliki manfaat penting bagi bangsa Indonesia. Mosi Integral ini diajukan pada 27 Juli 1956 dan memuat serangkaian poin-poin penting yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia," ungkapnya. Beberapa manfaat dari

Mosi Integral Muhammad Natsir bagi bangsa Indonesia, kata Lili, antara lain, Memperkuat Kemandirian Ekonomi.

"Mosi Integral ini menekankan pentingnya kemandirian ekonomi nasional. Salah satu poin yang disebutkan adalah mengurangi ketergantungan pada modal asing dan meningkatkan penggunaan sumber daya alam Indonesia. Dengan demikian, Mosi Integral Muhammad Natsir membuka jalan bagi pembangunan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan," jelasnya.

Kedua, imbuhnya, Meningkatkan Kepatuhan Hukum. Mosi Integral ini juga menekankan pentingnya

kepatuhan terhadap hukum.

"Salah satu poin yang disebutkan adalah memperkuat independensi kekuasaan kehakiman dan meningkatkan kualitas sistem peradilan. Dengan demikian, Mosi Integral Muhammad Natsir berperan dalam membangun negara hukum yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Ketiga, lanjutnya, memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa: Mosi Integral ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa.

"Salah satu poin yang disebutkan adalah menghormati perbedaan agama, suku, dan budaya di Indonesia. Dengan demikian, Mosi Integral Muhammad Natsir membuka jalan bagi pembangunan masyarakat yang harmonis dan sejahtera tanpa diskriminasi," urai Lili.

Selengkapnya kunjungi [fraksidr.pks.id](https://fraksidr.pks.id)

“Muhammad Natsir adalah seorang pemimpin dan pemikir politik Indonesia terkemuka yang memberikan kontribusi signifikan bagi perjuangan bangsa untuk kemerdekaan dan pembangunan pasca kemerdekaan,

**Prof. Dr. LILI ROMLI, M.Si**

Peneliti Utama Pusat Riset Politik BRIN



## Peringatan Mosi Integral Natsir, Presiden Gema Keadilan: Sangat Penting Dipahami Generasi Muda

Jakarta (03/04) --- Presiden Gema Keadilan, Indra Kusumah menjadi narasumber dalam kegiatan Peringatan Hari Mosi Integral Muhammad Natsir Fraksi PKS DPR RI dengan tema 'Semangat Generasi Menjaga (Mosi Integral) NKRI', Senin, (03/04).

Pada kesempatan itu, Presiden Gema Keadilan ini menyampaikan bahwa Urgensi Pemahaman sejarah bangsa sangat penting untuk dipahami agar anak bangsa memiliki orientasi masa depan yang jelas.

"Saat negara Indonesia dipecah belah oleh Belanda lewat RIS, M. Natsir melakukan kerja-kerja politik yang sangat canggih. Semua pemimpin negara-negara bagian di dalam RIS satu-persatu di datangi, di-lobby untuk kemudian diajak kembali pada satu negara kesatuan Republik Indonesia," ujar Indra.

Indra menyampaikan bahwa mosi integral yang dilakukan oleh M. Natsir dan tim dapat dijadikan inspirasi bagi generasi muda dalam melakukan networking dan kolaborasi.

"Mosi Integral merupakan kerja politik dengan M. Natsir dan Tim, hal ini dapat diteladani oleh generasi muda untuk selalu bisa melakukan networking yang dapat berkolaborasi untuk bisa

menjadi satu kepentingan utama yaitu untuk negara Indonesia," pungkas Indra.

Menurut Indra, 3 April sebagai hari NKRI sudah memiliki dasar yang kuat dari sejarah perjuangan kerja cerdas Mohammad Natsir.

"Dasar sejarah kuat untuk menjadikan 3 April menjadi hari NKRI. Karena berkat Mosi integral Natsir, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan berhasil untuk NKRI terus diucapkan hingga saat ini," ucap Indra.

Terdapat tiga sektor untuk

kontribusi, menurut Indra. Anak muda didorong untuk berkontribusi lewat ketiga sektor ini.

"Terdapat tiga sektor untuk kita berkontribusi, pada sektor publik, sektor ketiga berupa komunitas, dan sektor privat, yaitu sektor bisnis. Generasi muda dapat memilih salah satu untuk mewujudkan cita-cita nasional lewat media kontribusi ini," pungkas Indra.

Menutup pembahasannya, Indra menyampaikan agar menjadikan hari ini untuk mengingat kembali peran pahlawan masa lalu dan berjuang selalu untuk menuntaskan reformasi.

"Dalam 3 April ini, mari kita menyadari ulang dan mengapresiasi peran Mohammad natsir pada terwujudnya NKRI, dan mari kita berkontribusi untuk melanggengkan persatuan dan menuntaskan reformasi," tutup Indra.

"Mosi Integral merupakan kerja politik dengan M. Natsir dan Tim, hal ini dapat diteladani oleh generasi muda untuk selalu bisa melakukan networking yang dapat berkolaborasi untuk bisa menjadi satu kepentingan utama yaitu untuk negara Indonesia,"

**Dr. INDR A KUSUMAH, M.Si**

Presiden Gema Keadilan



**Follow  
Akun tiktok  
Fraksi PKS DPR RI**

**@fraksipksdprri**



## Hadiri Rakernas 2023, Jazuli Juwaini Harap HDMI Bisa Berkolaborasi dengan Berbagai Elemen



Kabupaten Bogor (20/03) --- Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menghadiri agenda penutupan Rapat Kerja Nasional 2023 Himpunan Dai Muda Indonesia (HDMI) pada Ahad, (19/03/2023) yang dihadiri oleh Dai muda dari berbagai daerah di Indonesia, serta beberapa tokoh.

Dalam sambutannya, Jazuli menyampaikan dan menegaskan bahwa HDMI telah tepat memilih ceruk dakwah, yaitu anak muda, mengingat kondisi bonus demografi yang akan dirasakan oleh Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

"Saya menekankan pentingnya berkolaborasi dengan berbagai pihak serta pandai beradaptasi dan menyampaikan kebaikan dengan hal-hal yang menarik," ungkap Anggota Komisi I DPR RI ini.

Jazuli berharap setelah Rakernas 2023 dilaksanakan, HDMI menjadi organisasi yang semakin kokoh, semakin kuat, dan luas kebermanfaatannya bagi Indonesia.

Sementara itu Ketua Umum HDMI, Habib Idrus Salim al-Jufri, menjelaskan bahwa selama dua hari kebelakang, telah dilaksanakan rangkaian acara yang bertujuan untuk

meningkatkan kapasitas dan kualitas anggota HDMI ketika berdakwah dan berkontribusi secara positif di masyarakat.

"Rangkaian acara tersebut meliputi kunjungan ke Walikota

Tangerang, presentasi program kerja, diskusi panel, dan pelatihan keterampilan," pungkasnya.

Habib Idrus menambahkan, setelah penutupan acara Rakernas 2023 ini, HDMI berharap dapat terus berkontribusi positif dalam memperkuat jaringan dakwah dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.

HDMI telah tepat memilih ceruk dakwah, yaitu anak muda, mengingat kondisi bonus demografi yang akan dirasakan oleh Indonesia dalam beberapa tahun mendatang. Saya menekankan pentingnya berkolaborasi dengan berbagai pihak serta pandai beradaptasi dan menyampaikan kebaikan dengan hal-hal yang menarik,"

**Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI



Narsum Seminar Nasional,

## Aleg PKS Sampaikan Keunggulan Ekonomi Syariah bagi Kesejahteraan Masyarakat

Jakarta (13/03) -- Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati menjadi narasumber pada kegiatan Seminar nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (SANKSI) 2023 yang bertemakan 'Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Dalam Kompleksitas Masyarakat 5.0'.

Acara yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan itu diadakan secara daring Senin, (13/03/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Anies menyampaikan tantangan ekonomi nasional Indonesia menghadapi tantangan middle income trap dan penurunan status pendapatan ke level lower middle income.

Implikasi kesejahteraan masyarakat semakin terpuruk, dan persoalan-persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan semakin memburuk.

"Untuk menjawab berbagai permasalahan tersebut, perlu optimalisasi potensi dan memanfaatkan seluruh peluang yang ada untuk kepentingan ekonomi nasional, termasuk perkembangan ekonomi syariah global," ucap Anis yang merupakan Anggota Komisi XI DPR RI itu.

Lebih jauh lagi Anis

menyampaikan bahwa perkembangan keuangan syariah, pasar ekonomi halal, pariwisata halal, dan dana-dana investor syariah global harus dioptimalkan untuk kepentingan nasional dalam rangka memecahkan berbagai permasalahan ekonomi fundamental seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi yang semakin berat akibat dampak pandemi.

"Beberapa negara berlomba untuk menjadi pemain utama dalam keuangan syariah, ekonomi halal, pariwisata halal, dan berupaya serius menjadi destinasi untuk menarik dana-dana global dari

investor syariah global," ungkapnya.

Anis juga menyatakan bahwa perkembangan ekonomi syariah global harus dipandang sebagai peluang dan potensi keunggulan bagi Indonesia.

"Indonesia bisa mengambil manfaat dari besarnya pasar halal global dan dana-dana syariah global, sehingga memberikan multiplier effect bagi dunia usaha, UMKM, penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi nasional. Berbagai negara berlomba untuk mengoptimalkan manfaat dari perkembangan keuangan syariah, pasar ekonomi halal, pariwisata halal, dan dana-dana investor syariah global untuk ekonomi nasionalnya masing-masing," tegas Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan.

Indonesia sebagai Negara Muslim terbesar, imbuhnya, memiliki posisi yang masih belum memuaskan dalam pasar halal global maupun keuangan syariah. Untuk posisi perbankan syariah baru peringkat 10

BERIKUTNYA >>>

"Perlunya sinergi dan integrasi yang lebih mendalam antara Keuangan Publik Negara dengan Keuangan Sosial Syariah agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk membantu masyarakat bawah dan juga kelompok dhuafa."

## Narsum Seminar Nasional, Aleg PKS Sampaikan Keunggulan Ekonomi Syariah bagi Kesejahteraan Masyarakat

dalam ranking global.

Menurut Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Anis Byarwati Keuangan Sosial Syariah bisa mendukung pengentasan kemiskinan.

"Perlunya sinergi dan integrasi yang lebih mendalam antara Keuangan Publik Negara dengan Keuangan Sosial Syariah agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar untuk membantu masyarakat bawah dan juga kelompok dhuafa."

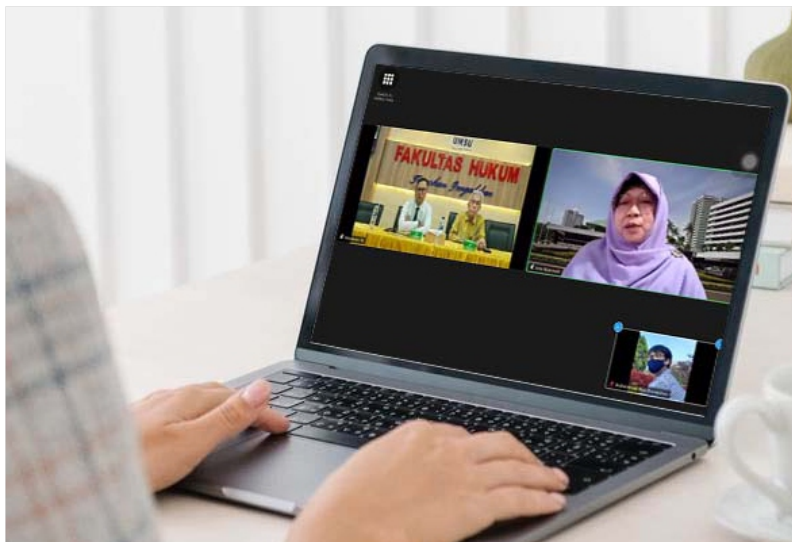
Anis menambahkan dibutuhkan desain perencanaan kebijakan ekonomi yang kokoh untuk dapat mengoptimalkan dan mensinergikan seluruh potensi Kebijakan Moneter, Kebijakan Fiskal, Kebijakan Sektoral, SDA, Keuangan Publik Negara, Keuangan Sosial Islam, dan Dana-Dana Sosial Masyarakat untuk kepentingan nasional.

Anis memandang bahwa Paradigma kebijakan yang berkembang saat ini masih memfokuskan peran Ekonomi Syariah masih dominan pada peran keuangan syariah dan pengembangan ekonomi halal.

"Tantangan terpenting saat ini bagaimana nilai-nilai Ekonomi Syariah dengan semangat keadilan dan taawun dapat terinternalisasi dalam kebijakan moneter, fiskal, sektor riil, dan kebijakan sektoral lainnya sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan menolong rakyat," pungkask politisi senior PKS tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa peran Ekonomi dan Keuangan Syariah perlu didorong lebih optimal. Perkembangan keuangan syariah secara umum cukup baik meski masih menempati ceruk yang kecil dalam pembiayaan ekonomi nasional. Sektor keuangan syariah mendapat perhatian yang cukup besar, dan kurang diimbangi pengembangan sektor-sektor ekonomi syariah yang lain.

"Ke depan perlu digali lebih mendalam nilai nilai ekonomi syariah untuk dapat menggerakkan sektor riil agar lebih optimal dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat," ujar Anis.



"Indonesia bisa mengambil manfaat dari besarnya pasar halal global dan dana-dana syariah global, sehingga memberikan multiplier effect bagi dunia usaha, UMKM, penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi nasional. Berbagai negara berlomba untuk mengotimalkan manfaat dari perkembangan keuangan syariah, pasar ekonomi halal, pariwisata halal, dan dana-dana investor syariah global untuk ekonomi nasionalnya masing-masing,"

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI



# Peringati 73 Tahun Mosi Integral Natsir, HNW Kembali Usulkan 3 April sebagai Hari NKRI

Jakarta (03/04) --- Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mengusulkan kembali agar 3 April tanggal diterimanya Mosi Integral Natsir, ditetapkan oleh Negara sebagai Hari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Sebab, imbuhnya, tanpa adanya Mosi Integral yang diterima oleh DPR RIS dan Pemerintah (Presiden Soekarno dan Wapres Hatta) pada 3 April 1950 itu, maka tidak ada NKRI apalagi dengan jargon 'NKRI harga mati'.

Mengapa, HNW sapaan akrabnya mengingatkan, bahwa sebelum mosi integral tersebut diterima, NKRI sudah diadakan oleh kolonialis Belanda, yang ada justru adalah RIS (Republik Indonesia

Serikat).

"Penetapan Hari NKRI ini selain sebagai pengamalan prinsip JAS MERAH (Jangan Sekali-kali Meninggalkan/Melupakan Sejarah) yang diajarkan oleh Bung Karno dengan memperingati kembalinya Indonesia menjadi NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) setelah sebelumnya melalui KMB 27/12/1949 RI diubah oleh Belanda menjadi RIS (Republik Indonesia

Serikat), juga untuk memperingati peristiwa penting tapi banyak dilupakan atau tidak diketahui oleh masyarakat, yaitu hari mensejarah disampaikannya koreksi agar RI yang sudah diubah oleh Belanda menjadi RIS, agar kembali menjadi NKRI," jelas HNW.

Peristiwa itu terjadi, kata HNW, berkat Mosi Integral yang disampaikan di dalam rapat paripurna DPR RIS pada 3 April 1950, oleh Ketua Fraksi Partai Islam Masyumi ; Mohammad Natsir.

"Penetapan Hari NKRI ini sangat perlu dan strategis. Karena sekalipun belakangan menggema dengan lantang teriakan 'NKRI Harga Mati' tapi peristiwa bersejarah Mosi Integral 3 April 1950 oleh M Natsir yang sukses jadi tonggak lahirnya kembali NKRI, banyak tidak diketahui atau dilupakan oleh khalayak ramai. Maka diharapkan penetapan Hari NKRI pada 3 April juga sebagai komitmen bersama untuk terus menguatkan ingatan kolektif bangsa akan sejarah perjuangan lahirnya kembali NKRI, agar warga bangsa secara bersama-sama dapat menjaga dan memajukan NKRI sekarang dan ke depan," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (03/04).

HNW mengatakan bahwa NKRI merupakan salah satu elemen penting bagi bangsa Indonesia. Bahkan, MPR RI

menetapkan NKRI menjadi salah satu pilarnya bersama tiga pilar lainnya, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Beberapa pilar tersebut telah ditetapkan sebagai Hari Nasional seperti Hari Konstitusi (UUD NRI 1945) pada 18 Agustus melalui Keppres No. 18 Tahun 2008 dan Hari Lahir Pancasila 1 Juni melalui Keppres 24 Tahun 2016.

"Jadi, sekarang menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi, sudah saatnya Presiden Joko Widodo meninggalkan legacy dengan menerbitkan Keppres untuk menetapkan 3 April sebagai Hari NKRI, hal yang akan jadi momentum

untuk hadirkan ingatan dan semangat kolektif bangsa jaga NKRI, juga ingatkan pentingnya berkontribusi menguatkan komitmen memajukan NKRI secara nasional, massif dan berkelanjutan," ujarnya.

Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa penetapan Hari NKRI tentu saja bukan hanya untuk kepentingan seremonial belaka, melainkan sebagai upaya menghadirkan ingatan kolektif dan komitmen semua warga bangsa Indonesia untuk terus merestorasi persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana ketentuan sila ke 3 dari Pancasila. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir,

BERIKUTNYA >>>

HNW mengatakan bahwa NKRI merupakan salah satu elemen penting bagi bangsa Indonesia. Bahkan, MPR RI menetapkan NKRI menjadi salah satu pilarnya bersama tiga pilar lainnya, yakni Pancasila, UUD NRI 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Beberapa pilar tersebut telah ditetapkan sebagai Hari Nasional seperti Hari Konstitusi (UUD NRI 1945) pada 18 Agustus melalui Keppres No. 18 Tahun 2008 dan Hari Lahir Pancasila 1 Juni melalui Keppres 24 Tahun 2016.



## Peringati 73 Tahun Mosi Integral Natsir, HNW Kembali Usulkan 3 April sebagai Hari NKRI

### « SEBELUMNYA

bangsa Indonesia seakan terpolarisasi dan terbelah akibat perbedaan pilihan politik di dalam pemilu atau pilpres.

“Maka harus ada upaya ekstra untuk merekat kembali persatuan bangsa Indonesia ini. Salah satunya ya meneladani kenegarawanan Bapak-Bapak Bangsa yang sukses atasi pembelahan yang dilakukan kolonialis Belanda dengan mengubah RI menjadi terpecah ke dalam

16 negara RIS. Para Bapak Bangsa dari latar belakang politik dan agama yang berbeda tetapi dapat bersatu via Mosi Integral Natsir 3 April 73 tahun yang lalu, hadirkan kesatuan dengan sepakat putusan menerima Mosi Integral mengembalikan RI jadi NKRI, bukan RIS lagi. Itulah makin dirasa penting dan mendesaknya menetapkan 3 April sebagai Hari NKRI.

Agar semua komponen masyarakat memahami bahwa kita pelanjut sejarah, kita binneka tapi tunggal lka, kita

semua adalah satu kesatuan bangsa Indonesia, meski ada perbedaan dalam pilihan politik atau latar belakang lainnya,” tukasnya.

Apalagi, lanjut HNW, tantangan ke depan untuk menjaga dan memajukan NKRI ini tidaklah mudah.

“Ada banyak aksi-aksi yang dapat membahayakan NKRI, seperti masih munculnya gerakan separatis atau mulai bangkitnya ideologi-ideologi terlarang yang mengancam kelanjutan kedaulatan NKRI (Islam) dan memperjuangkan cita-cita Indonesia Merdeka teknologi informasi,” ujarnya.

HNW mengatakan Hari NKRI pada 3 April juga dapat menjawab kesalahpahaman sejumlah kalangan terkait hubungan negara dan agama. Hal ini sudah ditunjukkan oleh Allahu Yarham Buya M Natsir pencetus Mosi Integral, yang merupakan Ketua Umum Partai Islam Masyumi.

“Di Indonesia ini, ada yang berpaham Islamophobia dan Indonesiaphobia. Islamophobia adalah yang selalu sentimen

negatif bahkan bisa antipati dengan Islam dan ingin memisahkan negara dan agama. Sedangkan, Indonesiaphobia adalah mereka yang kerap mengkafirkan Indonesia karena dinilai tidak sesuai syariat Islam,” ujarnya.

“Padahal, Pak Natsir dengan kapasitasnya sebagai Politisi ulung dan Agamawan handal sudah menunjukan dan mengajarkan kita bahwa selaku pimpinan Partai Islam terbesar pada masanya, kecintaan Beliau terhadap NKRI tidak pernah surut dan bahkan terus berupaya dengan berjuang merawat dan menjaganya, antara lain dengan Mosi Integral dan sukses laksanakan amanat sebagai Perdana Menteri Pertama di era NKRI, dengan Indonesia mendapatkan pengakuan dari PBB dan keanggotaan penuh di PBB. M Natsir membuktikan beragama (Islam) dan memperjuangkan cita-cita Indonesia Merdeka menjadi NKRI adalah kesatuan. Semoga dengan ditetapkan dan diperingatinya Hari NKRI, makin kuat juga tersegarkan terus komitmen bangsa untuk majukan NKRI dan koreksi apapun yang bisa membelah dan membahayakan NKRI,” pungkask Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.



“Penetapan Hari NKRI ini sangat perlu dan strategis. Karena sekalipun belakangan menggema dengan lantang teriakan ‘NKRI Harga Mati’ tapi peristiwa bersejarah Mosi Integral 3 April 1950 oleh M Natsir yang sukses jadi tonggak lahirnya kembali NKRI, banyak tidak diketahui atau dilupakan oleh khalayak ramai.

**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Wakil Ketua MPR RI



## PKS Kecewa Piala Dunia U-20 Batal di RI: FIFA Terima Qatar Tolak LGBT

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) mengaku kecewa FIFA secara terburu-buru mencabut status tuan rumah Indonesia untuk Piala Dunia U-20 tahun 2023. Ia menegaskan FIFA telah bertindak diskriminatif terhadap Indonesia.

"Ya saya sangat kecewa ya FIFA membuat keputusan yang cepat itu. Padahal ketum PSSI udah kesana untuk lobi apa yang jadi concern Indonesia," kata pria yang akrab disapa HNW itu kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/2).

"Harusnya FIFA berlaku tak diskriminatif. Artinya FIFA betul-betul sportif dan adil. Karena keputusan FIFA tadi malam itu jelas diskriminatif," tambahnya.

HNW mengatakan FIFA sama sekali tidak mengakomodasi kekhasan konstitusi yang dimiliki Indonesia. Konstitusi Indonesia, kata dia, tegas menyatakan tak memiliki hubungan diplomatik

dengan Israel dan menjunjung tinggi kemerdekaan Palestina.

"Tak akomodasi kekhasan Indonesia atau apa yang menjadi rujukan di Indonesia. Karena dia udah tahu sebelum menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah, Indonesia ada konstitusi. Ketika FIFA tetap menunjuk Indonesia, harusnya punya anjang-ancang itu," kata dia.

Di sisi lain, HNW menyinggung ada beda perlakuan yang dilakukan FIFA terhadap Indonesia dan negara Qatar.

FIFA, kata HNW, justru memperbolehkan negara Qatar sebagai tuan rumah melarang

kampanye dan atribut Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) digunakan saat gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar.

"Kekhasan Qatar soal penolakan LGBT itu mereka [FIFA] terima kok. Ketika Qatar diterima, Indonesia harusnya diterima juga dong. Ketika FIFA bilang enggak diskriminatif, tapi malah diskriminatif," kata dia.

Tak berhenti sampai di situ, HNW juga menilai FIFA mampu memberi sanksi melarang tim nasional sepak bola Rusia untuk bertanding di Piala Dunia 2022 lantaran negara itu tengah menginvasi Ukraina. Tapi di sisi lain, ia menilai FIFA tak mampu bersikap tegas kepada Israel yang menjajah Palestina jauh sebelum adanya invasi Rusia ke Ukraina.

"Saya sesalkan FIFA terburu-buru dan ini merugikan Indonesia," kata dia.

PKS sebelumnya telah menyatakan sikap menolak kehadiran tim nasional Israel untuk bertanding di Piala Dunia U-20 yang digelar di Indonesia.

Kabar pembatalan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 sudah mulai ramai terdengar sejak FIFA membatalkan acara drawing di Bali. Pembatalan drawing di Bali dikaitkan dengan gencarnya penolakan kehadiran Israel di Piala Dunia U-20 oleh beberapa pihak termasuk I Wayan Koster dan Ganjar Pranowo.

Erick Thohir sempat

berangkat bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino untuk melakukan pembicaraan terkait polemik ini. Namun FIFA tetap

pada keputusannya mencopot status tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 dari tangan Indonesia.








"Tak akomodasi kekhasan Indonesia atau apa yang menjadi rujukan di Indonesia. Karena dia udah tahu sebelum menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah, Indonesia ada konstitusi. Ketika FIFA tetap menunjuk Indonesia, harusnya punya anjang-ancang itu,"

**Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Wakil Ketua MPR RI



**Kunjungi  
Kanal Resmi  
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)
-  Instagram  
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter  
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook  
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/fraksi.pks.dpr.ri)
-  Youtube  
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/playlist?list=PLKSTV DPR RI)

***Nantikan  
Setiap Pekan***